



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMISAHAN AGAMA DAN POLITIK DALAM ISLAM
DI INDONESIA
PADA MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA**

SKRIPSI

**ARIYANI MAULINA
NPM 0704070129**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ARAB
DEPOK
JANUARI 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMISAHAN AGAMA DAN POLITIK DALAM ISLAM
DI INDONESIA
PADA MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Humaniora**

**ARIYANI MAULINA
NPM 0704070129**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ARAB
DEPOK
JANUARI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ariyani Maulina

NPM : 0704070129

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Januari 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Ariyani Maulina
NPM : 0704070129
Program Studi : Sastra Arab
Judul : Pemisahan Agama dan Politik dalam Islam
di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Arab, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Muhammad Luthfi Zuhdi ()
Pembimbing : Dr. Mohammad Iskandar ()
Penguji : Suranta, M.Hum ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 6 Januari 2009

oleh

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dr. Bambang Wibawarta
NIP

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan banyak pertolongan dan kurnia-Nya atas saya, sehingga saya dipandaikan-Nya dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pemisahan Agama dan Politik dalam Islam di Indonesia pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda” ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora Program Studi Arab pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Muhammad Luthfi Zuhdi dan Dr. Mohammad Iskandar yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini, dan telah memberikan banyak wawasan kepada saya tentang sejarah dan tentang bagaimana cara penulisan yang baik. Terimakasih kepada Bapak Suranta, M.Hum. karena telah menguji dan memberikan banyak masukan tentang skripsi saya. Terimakasih kepada Dr. Afdhol Tharik yang telah sabar membantu saya dalam detik-detik terakhir penyerahan skripsi ini. Terimakasih kepada Ibu Siti Rahmah S., M.Hum. yang telah memberikan motivasi kepada saya, sehingga saya tertantang untuk tetap menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada seluruh staf pengajar Program Studi Arab yang telah membimbing saya dan memberikan banyak ilmu kepada saya selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Kesuksesan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari orang-orang terdekat saya yang telah membantu dan *men-support* saya secara moral, spiritual, dan material, sehingga akhirnya skripsi ini rampung juga. Kepada kedua orang tua saya yang saya cintai, terimakasih banyak karena sudah dengan sangat sabar membesarkan saya dan mendidik saya. Cinta saya kepada kalian tidak akan pernah rusak. Kepada kakak-kakak saya, Mbak Dewi, Mas Agung, Mas Ari, dan Mbak Omah, yang dengan sabar tetap menyayangi saya sebagai adiknya. *Special thanks to* Mbak Dewi, yang udah mau direpotin karena *laptop*-nya dipinjem terus. Untuk keponakan-keponakan saya, Reza, Tasya, dan Nada, yang selalu membawa keceriaan dengan kelucuan-kelucuannya.

Tidak lupa sebuah nama yang selalu ada di dalam hati saya, Muhammad Arli Nugraha, yang selalu dengan sabar mendengarkan keluh kesah dan menghadapi

segala kebingungan saya dalam pembuatan skripsi ini. Dan juga selalu setia menemani saya dalam tangis maupun tawa. Terimakasih pula saya ucapkan kepada orang-orang penting yang selalu mendukung saya untuk menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Kepada teman-teman Sastra Arab UI angkatan 2004, yang sudah meninggalkan kampus lebih dulu ataupun yang masih tetap bertahan. Untuk Arif, makasih udah nemenin pada saat-saat terakhir pengumpulan skripsi, Miqdat, makasih udah bantuin ngedit, Vandra, makasih *laptop*-nya boleh dipakai waktu sidang, Ihsan, makasih makanannya yang buat panitia sidang, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terimakasih juga teman-teman dari jurusan lain di FIB yang selalu memberi motivasi kepada saya. Sekian lama saya berada di kampus, menjadikan kisah kehidupan saya menjadi lebih berwarna.

Akhir kata, semoga Allah membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan membuat siapa saja yang membacanya akan lebih mencintai tentang sejarah bangsanya. Karena sebuah bangsa yang kuat ialah bangsa yang masyarakatnya memahami tentang sejarah bangsanya sendiri.

Depok, 6 Januari 2009

Penulis

Ariyani Maulina

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariyani Maulina
NPM : 0704070129
Program Studi : Program Studi Arab
Fakultas : Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pemisahan Agama dan Politik dalam Islam di Indonesia pada Masa
Pemerintahan Hindia Belanda.**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 6 Januari 2009

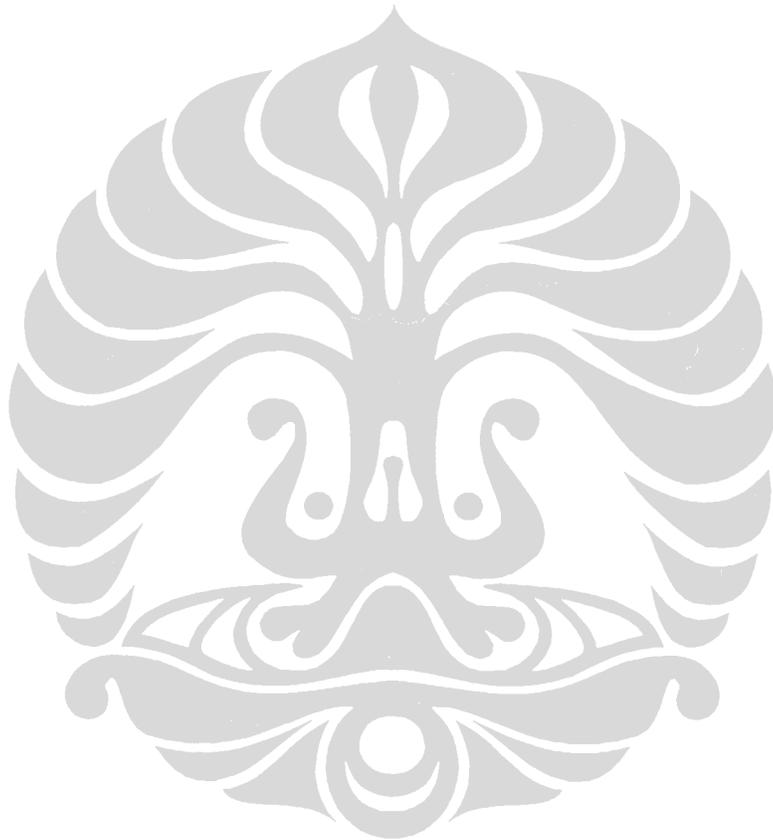
Yang menyatakan

(Ariyani Maulina)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	4
I.3 Ruang Lingkup	5
I.4 Tujuan Penulisan	5
I.5 Metodologi Penelitian.....	6
I.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II SEBAB-SEBAB PEMISAHAN AGAMA DAN POLITIK DALAM ISLAM OLEH PEMERINTAH HINDIA BELANDA.....	9
II.1 Kedatangan Belanda di Indonesia.....	9
II.2 Repon Masyarakat Indonesia	11
II.2.1 Sikap Masyarakat Bangsawan dan Birokrat.....	12
II.2.2 Sikap Para Ulama	13
II.2.3 Sikap Masyarakat Petani	14
II.3 Perlawanan Rakyat Indonesia Kepada Belanda.....	15
II.3.1 Perlawanan Dari Kerajaan Islam.....	16
1. Perang Paderi	16
2. Perang Diponegoro	20
3. Perang Aceh	24
4. Perang Banjar.....	27
II.3.2 Perlawanan Masyarakat Petani.....	30
1. Peristiwa Garut.....	30
2. Perlawanan Petani Banten.....	31
BAB III PEMISAHAN AGAMA DAN POLITIK DALAM ISLAM DI INDONESIA OLEH PEMERINTAH HINDIA BELANDA	34
III.1 Masa Sebelum Kedatangan Snouck.....	34
III.2 Masa Setelah Kedatangan Snouck.....	36
III.2.1 Snouck Hurgronje	36
III.2.2 Politik Islam Hindia Belanda	37
1. Bidang Agama Murni (Ibadah).....	38
2. Bidang Sosial Kemasyarakatan.....	42
3. Bidang Politik	43
III.2.3 Pemisahan Agama dan Politik dalam Islam.....	44
1. Pembatasan Haji.....	45
2. Bidang Pendidikan	50
3. Pemanfaatan Adat	55

4. Pemisahan Struktur Masyarakat Islam.....	56
BAB IV KESIMPULAN.....	59
DAFTAR REFERENSI	61



ABSTRAK

Nama : Ariyani Maulina
Program Studi : Program Studi Arab
Judul : Pemisahan Agama dan Politik dalam Islam di Indonesia
pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Skripsi ini berisikan tentang latar belakang terjadinya pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mencari tahu sebab terjadinya pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia, serta proses terjadinya pemisahan tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan, didapat bahwa pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu pada abad ke-19. Belanda melakukan pemisahan antara agama dan politik dalam Islam karena kehadiran Belanda di Indonesia mendapat perlawanan dari masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islamnya. Belanda juga menganut paham Barat, yang menyatakan bahwa agama hanyalah urusan individu, sehingga urusan agama dan politik tidak dapat dicampur adukkan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode sejarah. Data-data yang didapat berasal dari studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan yang dilakukan, penulis berusaha menemukan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian data-data tersebut dikaji dan dianalisa sehingga menjadi sebuah tulisan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tujuan pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda tidak hanya bertujuan untuk meredam perlawanan rakyat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, tetapi pemerintah Hindia Belanda juga ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan menanamkan sistem hukumnya di Indonesia.

Kata kunci:
Agama, politik, Islam, pemerintah Hindia Belanda.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Islam di Indonesia, pada awalnya dijalankan oleh masyarakat Indonesia tidak berbeda dengan yang dijalankan di Arab pada masa ketika dipimpin oleh Nabi Muhammad s.a.w. Pada saat itu, kehidupan bermasyarakat dan beragama berpedoman pada ajaran Islam, yaitu al-Quran dan Sunnah. Demikian pula di Indonesia, pada awalnya kerajaan-kerajaan Islam mempraktikkan sistem hidup yang sama. Dalam praktik pelaksanaan ajaran Islam, masyarakat Indonesia yang beragama Islam menjalankan kegiatan politik selaras dengan kegiatan keagamaan. Aturan Islam tidak hanya dipakai dalam menjalankan kegiatan keagamaan saja, namun, dalam menjalankan aktivitas kehidupan yang lain, yaitu kegiatan politik, juga dijalankan berdasarkan aturan Islam.

Pengertian dari kegiatan politik ialah segala macam aktivitas yang dijalankan seorang umat ketika berhubungan dengan orang lain. Sedangkan yang dimaksud kegiatan keagamaan, yaitu aktivitas yang dilakukan berhubungan langsung dengan Allah, Tuhan Yang Maha Pencipta. Kedua kegiatan tersebut diajarkan dalam Islam, yaitu *hablum minallah* (hubungan antara manusia dengan Allah), adalah kegiatan agama, dan *hablum minannas* (hubungan antara manusia dengan manusia), adalah kegiatan politik. Kedua ajaran itu harus dijalankan secara seimbang.

Kondisi seperti di atas kemudian berubah ketika pemerintahan kolonial Belanda mengambil alih kekuasaan para Raja Islam pada masa itu. Pelaksanaan ajaran Islam dipisahkan antara politik dan agama. Menurut Belanda, pelaksanaan aspek agama dan politik dalam Islam harus dipisahkan karena beberapa alasan, yaitu: pertama, menurut paham Barat, agama hanyalah urusan individu, dan hanya

sebatas kebudayaan. Tidak ada pihak manapun yang berhak mengganggu-gugat keputusan seseorang dalam beragama. Selain itu, menurut mereka, agama bukanlah suatu ideologi. Maka agama tidak dapat dicampuradukan dengan urusan politik.

Kedua, Belanda melihat bahwa ideologi Islam telah mengilhami terjadinya pemberontakan dan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap pemerintah Belanda. Untuk alasan-alasan tersebut, maka Belanda harus melakukan pemisahan antara agama dan politik dalam Islam. Dalam melakukan pemisahan antara agama dan politik dalam Islam di Indonesia, pemerintah Belanda mendatangkan seorang ahli Islam dari Belanda yang bernama Christiaan Snouck Hurgronje.

Menurut Snouck Hurgronje, dalam Islam diajarkan bahwa seorang umat apabila bertemu dengan orang yang tidak seagama dengan dirinya, maka orang tersebut wajib untuk dibunuh.¹ Pendapat tersebut sesuai dengan pernyataan yang terdapat di dalam al-Quran surat Muhammad, ayat 4, yang berbunyi:

فَإِذَا لَقِيْتُمْ الْكٰفِرِيْنَ كَفَرُوْا فَضْرِبُوْا الرِّقَابَ حَتّٰى اِذَا تَخَفْتُمْوَهُمْ
فَشُدُّوْا الرِّبٰتَ فَاِذَا مِتُّمۡ بَعۡدَ وَاٰمَافِدۡءٍ حَتّٰى تَضَعَ لِحُرۡبٍ
اَوْزَارَهَاۗ ذٰلِكَ وَاَلُوۡ يَشَآءُ اَللّٰهُ لَانۡتَصِرَ مِنْهُمۡ وَاَلٰكِنۡ لِّيَبۡلُوۡا بَعۡضَڪُمۡ
بِبَعۡضٍ وَّاَلَّذِيۡنَ قُتِلُوۡۤا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ فَلَنۡ يُضِلَّ اَعۡمٰلَهُمۡ ۝۴

Artinya: “Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang

¹ Snouck Hurgronje. *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje Jilid VIII*. Jakarta: INIS, 1993.

lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya amal mereka.” (QS. 47:4).

Maksud dari ayat tersebut ialah tentang kewajiban seorang muslim untuk melawan setiap usaha yang dilakukan oleh penguasa yang bukan beragama Islam, apabila mereka mengganggu ketentraman umat Islam. Dalam hal ini, Belanda, yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda dengan Islam, berusaha untuk menerapkan sistem hukumnya di Indonesia dengan cara-cara yang tidak baik, dan mengganti sistem hukum Islam yang sudah lebih dahulu ada, dengan sistem hukum Belanda. Untuk itu, umat Islam wajib untuk mempertahankan pelaksanaan sistem hukum Islam di Indonesia, dengan memerangi pemerintah Belanda di Indonesia.

Seorang muslim akan demikian bersemangatnya untuk berperang, dan akan dengan sendirinya hal tersebut akan membuat keyakinan mereka berkobar untuk memberontak terhadap kekuasaan kaum kafir.² Rakyat Indonesia juga semakin menyadari bahwa keberadaan pemerintah Belanda di Indonesia menjadi penyebab segala kesengsaraan yang menimpa mereka.

Dalam penelitiannya tentang Islam, Snouck Hurgronje berpendapat bahwa dalam Islam, agama dan negara adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.³ Islam menganggap bahwa seluruh dunia menurut hukum adalah daerah kaum muslimin, dan wajib untuk dipertahankan dari ancaman pihak manapun, seperti yang terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah, ayat 107, yang berbunyi:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا نَكُومِ مِّنْ دُونِ اللَّهِ

مِنْ وَّلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

² Snouck Hurgronje. *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje Jilid VII*. Jakarta: INIS, 1993. Hal. 63.

³ *Ibid.* Hal. 5.

Artinya: "Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong." (QS. 2:107)

Oleh karena itu, banyak terjadinya perlawanan dari masyarakat Islam terhadap pemerintah Belanda karena Belanda berusaha untuk menguasai daerah milik kaum muslimin. Snouck Hurgronje juga berpendapat, bahwa pada umumnya Belanda sedang menghadapi sebuah gerakan Islam yang fanatik, yang dipimpin oleh para ulama, dan mereka hanya bisa ditaklukan jika Belanda menggunakan kekuatan senjata, dengan ditunjang oleh strategi perang yang baik, dalam menghancurkan kekuatannya dari dalam. Menurutnya, perlawanan kaum muslimin terhadap pemerintah Belanda diusahakan oleh organisasi-organisasi besar, yang sebagian besar beranggotakan bukan orang-orang terpelajar, dan karena kepatuhan, menjalankan perintah dari para pemimpin agama mereka merupakan tugas yang sangat penting.

Melihat semakin banyaknya perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam melawan pemerintah Belanda tersebut, maka Belanda, dengan dibantu dan atas usul dari Snouck Hurgronje, membuat kebijaksanaan dengan memisahkan antara urusan agama dan politik dalam Islam.

Dengan dilakukannya pemisahan antara agama dan politik dalam Islam di Indonesia, maka Islam tidak lagi dijadikan sebagai ideologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga diharapkan perlawanan yang dilakukan rakyat terhadap Belanda menjadi berkurang.

I.2 Permusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu terjadi pemisahan antara agama dan politik dalam sistem Islam yang dijalankan di Indonesia pada masa sekarang ini. Pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia ini terjadi ketika

pemerintah Belanda berada di Indonesia pada abad ke-19. Untuk memandu arah penelitian, maka akan diajukan pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

“Apakah benar tujuan pemisahan agama dan politik dalam Islam oleh pemerintah Hindia Belanda hanya sekadar untuk meredam perlawanan rakyat yang diduga diilhami oleh ideologi Islam, ataukah ada tujuan lainnya?”

I.3 Ruang Lingkup

Penelitian ini akan membahas tentang latar belakang terjadinya pemisahan agama dan politik dalam Islam dan proses terjadinya pemisahan antara agama dan politik dalam Islam di Indonesia, yang terjadi pada masa pemerintah Belanda. Untuk itu batasan pembahasan hanya pada masa pemerintahan kolonialisme Belanda di Indonesia ketika kedatangan Snouck Hurgronje di Indonesia, yaitu pada tahun 1889-1942. Tahun 1889 penulis jadikan sebagai tahun batasan awal penelitian, karena tahun tersebut ialah tahun ketika Snouck Hurgronje datang ke Indonesia untuk pertama kalinya sebagai penasehat Belanda untuk urusan ketimuran dan agama Islam. Sedangkan tahun 1942 penulis jadikan sebagai batasan akhir penelitian, karena pada tahun tersebut kekuasaan Belanda atas Indonesia sudah berakhir dan berpindah ke tangan Jepang. Aspek dalam sistem Islam yang akan dibahas adalah aspek politik, yaitu berupa segala macam aktivitas kehidupan manusia, dan aspek agama, yaitu berupa kegiatan ritual, yang hubungannya langsung dengan Tuhan.

I.4 Tujuan Penulisan

Pemisahan antara agama dan politik dalam Islam di Indonesia terjadi sejak abad ke-19, yaitu pada masa kekuasaan pemerintah Belanda berada di Indonesia. Pemisahan antara agama dan politik, atau yang biasa kita kenal dengan istilah sekularisme, membawa dampak-dampak dalam kegiatan keagamaan masyarakat Islam di zaman sekarang. Masyarakat Islam Indonesia menjadi bangga dengan kebudayaan yang kebarat-baratan daripada kebudayaan asli bangsa Indonesia itu

sendiri. Bahkan masyarakat Islamnya, seolah-olah menjadi tidak paham dengan seluruh aturan yang berlaku dalam Islam.

Pendidikan yang diberikan oleh Barat, telah mengubah jalan pemikiran para pemuda Indonesia menjadi cara berpikir yang kebarat-baratan. Hal itu menyebabkan kebanyakan masyarakat Islamnya mulai meninggalkan nilai-nilai dasar dari sistem Islam. Untuk itu penulis merasa tema yang diambil ini, yaitu tentang pemisahan antara agama dan politik, penting untuk dibahas.

I.5 Metodologi Penelitian

Penelitian dalam pembuatan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah. Metode ini memiliki empat tahapan. Pertama adalah tahap heuristik, yaitu tahap pengumpulan data. Di sini penulis berusaha menemukan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh berupa sumber-sumber sejarah yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Sumber sejarah yang dimaksud terdiri dari sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah primer didapat dari buku-buku maupun artikel-artikel yang ditulis oleh Snouck Hurgronje sendiri, seperti dalam *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje* yang disusun dalam dua belas jilid. Dalam buku itu berisi tentang pandangan Snouck Hurgronje terhadap Indonesia, terutama urusan tentang Islam. Selain itu juga dalam buku *Nasihat-nasihat C.Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889—1936*, yang disusun dalam sepuluh jilid. Buku itu berisi tentang surat-surat dan laporan-laporan Snouck Hurgronje kepada pemerintah Kolonial Belanda sejak saat ia masih di Belanda sampai ia ditugaskan sebagai penasihat pemerintah Belanda di Indonesia.

Sumber sejarah sekunder didapat dari buku-buku karangan para pemikir Islam dan buku-buku dari para ahli sejarah Islam dan sejarah Indonesia, diantaranya Pemikiran Zuhairi, dkk dalam buku *Sejarah Pendidikan Islam* yang di dalamnya membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia sampai dengan pembahasan mengenai pendidikan Islam. Ada juga buku karya Sartono Kartodirdjo, dkk, dalam buku *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*, yang juga

membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Selain itu sumber yang didapat berhubungan tentang praktik politik yang dijalankan Snouck Hurgronje, selaku penasehat Belanda dalam membantu Belanda menerapkan sistem hukumnya di Indonesia, didapat dalam buku *Politik Islam Hindia Belanda*, karya H. Aqib Suminto.

Tahap kedua setelah pengumpulan data, baik yang didapat dari sumber primer maupun dari sumber sekunder, yaitu analisa dan kritik terhadap sumber. Dalam tahap ini penulis berusaha membandingkan data yang didapat dari sumber primer dan sumber sekunder dengan fakta yang didapat dari sumber primer dan sumber sekunder.

Tahap yang ketiga yaitu tahap interpretasi. Dalam tahap ini, penulis menafsirkan fakta-fakta sejarah yang didapat dari tahap analisa dan kritik. Tahap ini adalah upaya menangkap makna dari sejumlah fakta sejarah yang dimaksudkan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah. Tahap yang keempat adalah historiografi, yaitu penulisan terhadap kisah sejarah yang pernah terjadi.

Sumber-sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini didapat dari perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas Hukum, Perpustakaan Erasmus Huis di Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta, dan Perpustakaan Nasional, Jakarta.

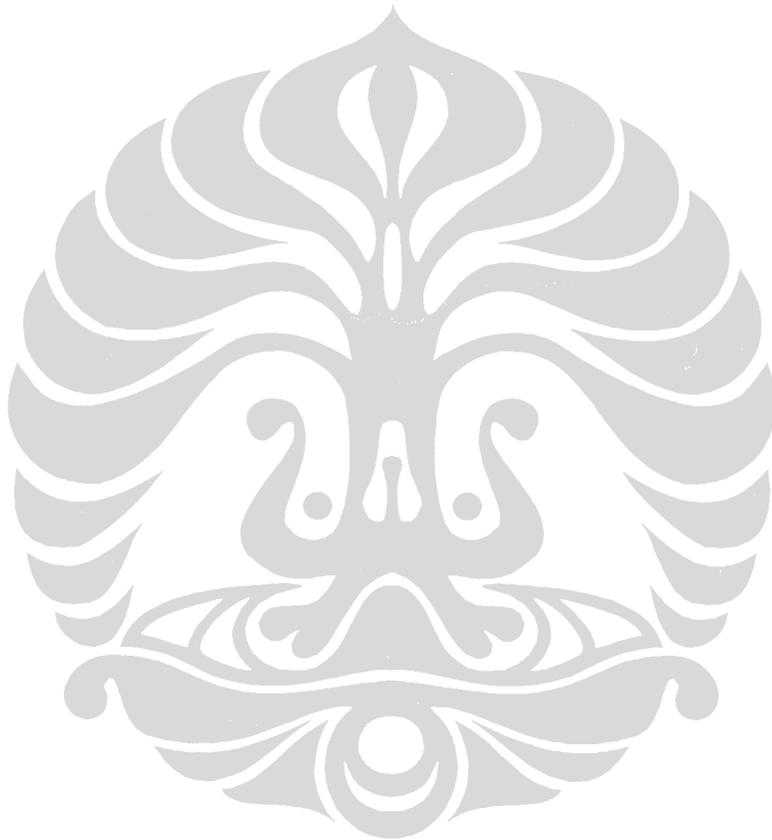
I.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan ditulis dalam empat bab yang berkaitan satu dengan yang lain. Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah tentang tema yang dipilih oleh penulis, perumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II akan diuraikan sebab-sebab yang mendorong terjadinya pemisahan antara agama dan politik dalam Islam yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, dan alasan mengapa pemisahan agama dan politik dianggap penting.

Bab III akan diuraikan tentang proses terjadinya pemisahan antara agama dan politik dalam Islam di Indonesia.

Bab IV adalah kesimpulan dari seluruh uraian di atas. Pada kesimpulan ini, penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang seluruh isi skripsi ini dari awal pembahasannya sampai akhir pembahasan.



BAB II

Sebab-sebab Pemisahan Agama dan Politik dalam Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda

II.1 Kedatangan Belanda di Indonesia

Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1602 melalui perusahaan dagangnya yang bernama VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*), dengan tujuan mengurus masalah pertanian di Indonesia.⁴ Awal kedatangan Belanda di Indonesia mendapat sambutan baik dari masyarakat Indonesia. Pada awal abad ketujuh belas hingga awal abad kedelapan belas terjadi toleransi dari pihak Belanda terhadap hukum Islam.⁵ Namun pada periode berikutnya, terjadi pemindahan kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu dari VOC kepada pemerintah Belanda sendiri. Hal itu menyebabkan semakin berkembangnya kebijaksanaan yang sifatnya intervensionis dari pihak pemerintah Belanda terhadap hukum Islam dan hukum adat setempat.⁶

Hadirnya pemerintah Belanda di Indonesia pada abad ke-17 tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, karena pada masa itu pemerintah Belanda memilih untuk tidak ikut campur tangan dalam segala urusan tentang Islam. Namun pada tahun-tahun berikutnya mulai terjadi perubahan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda.

Pada abad kesembilan belas, terjadi pengalihan kontrol kekuasaan oleh pemerintah Belanda di Indonesia, yang ditandai dengan berakhirnya kontrol VOC

⁴ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS. 1998. Hal. 29

⁵ *ibid.*

⁶ *ibid.*

di Indonesia dan digantikan dengan pemerintahan yang langsung dari kerajaan Belanda.⁷ Sejak saat itu, pemerintah Belanda di Indonesia mulai ikut campur dalam urusan intern masyarakat Indonesia. Gubernur Jendral Daendles mengeluarkan satu ordonansi pada tahun 1808 untuk daerah pesisir pantai utara Jawa, dan menentukan bahwa kepala masjid (*penghulu*) harus bertindak sebagai penasihat dalam suatu pengadilan umum ketika para pihak yang berperkara adalah orang-orang Islam. Pada tahun 1819, ditetapkan suatu peraturan baru yang berisi bahwa penduduk asli Indonesia akan tetap menjadi subjek dari hukum-hukum mereka sendiri, dan seorang *penghulu* hanya akan menjadi pendengar dalam suatu persidangan dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil suatu keputusan. Tahun 1824, fungsi *penghulu* sebagai penerjemah dari hukum Islam secara praktis dihapus.⁸

Pemerintah kolonial Belanda berusaha memperlemah institusi pengadilan agama di Indonesia dengan mendukung perkembangan pengadilan hukum adat.⁹ Di Sumatera Barat, Belanda mendukung kaum adat yang sedang bertikai dengan kaum ulama dengan tujuan mengurangi eksistensi kaum ulama sehingga pengaruh Belanda dapat masuk pada masyarakat setempat.

Ikut campurnya Belanda dalam urusan intern masyarakat Indonesia menimbulkan perlawanan dari masyarakat Indonesia, terutama dilakukan oleh masyarakat Islamnya. Masyarakat Indonesia menolak masuknya pengaruh Belanda ke Indonesia, karena akan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang dijalankan berdasarkan aturan Islam.

Pada tahun 1889, Belanda mendatangkan Snouck Hurgronje sebagai penasihat Belanda untuk mengurus permasalahan Islam di Indonesia sampai akhirnya kekuasaan Belanda berakhir di Indonesia dan digantikan oleh Jepang pada tahun 1942.

⁷ *Ibid.* Hal. 30.

⁸ *Ibid.* Hal. 31.

⁹ *Ibid.*

II.2 Respon Masyarakat Indonesia terhadap Hadirnya Pemerintah Belanda di Indonesia

Di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk yang dijajahnya di kepulauan Nusantara ini adalah beragama Islam. Upaya Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di kepulauan Indonesia disambut dengan berbagai macam perlawanan dari masyarakat Indonesia. Perlawanan-perlawanan tersebut dilakukan terutama oleh masyarakat Islamnya.

Hadirnya pemerintah Belanda di Indonesia, dirasakan menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Pelaksanaan pajak, peraturan-peraturan tentang kerja rodi dan tanam paksa sangat mempengaruhi kehidupan kaum petani. Beban berat yang dirasakan rakyat menyebabkan timbulnya kerusuhan-kerusuhan dan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Nilai-nilai keagamaan dijadikan dasar dalam melakukan perlawanan tersebut. Hasilnya, menyebabkan golongan ulama tampil sebagai pemimpin dalam melawan kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia. Para pemimpin keagamaan itu dapat mengobarkan semangat rakyat melalui ajakan dan seruan. Karena pada dasarnya, para pemimpin dan tokoh agama sudah memiliki pengaruh yang besar dalam sistem masyarakat Islam, sehingga setiap ajakan dan seruan dari para pemimpin agama adalah merupakan suatu bentuk perintah yang harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

Semangat perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia kepada Belanda lebih dikobarkan lagi melalui suatu bentuk karya sastra, yaitu semboyan. Di dalam tiap-tiap perlawanan, semboyan dapat memberikan kesiapan mental yang sangat penting. Para pemimpin agama akan berusaha meyakinkan dan membulatkan tekad para pengikut dengan semboyan dan ajaran yang bersifat propaganda. Contoh semboyan terdapat dalam Hikayat Perang Sabil, yang menyemangati para pejuang Aceh dalam pertempuran melawan Belanda.¹⁰ Semboyan dan seruan yang diucapkan mengandung makna bahwa perang

¹⁰ Ibrahim Alfian. *Sastra Perang, Sebuah Pembicaraan Mengenai Hikayat Perang Sabil*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

melawan Belanda merupakan kewajiban, dan mati dalam peperangan tersebut berarti mati syahid.¹¹ Akibat dari semboyan pada Hikayat Perang Sabil juga mempengaruhi anak-anak dan para wanita untuk ikut berperang melawan Belanda.

Selain golongan ulama, unsur-unsur lain dalam sistem masyarakat Indonesia juga sama-sama berperang melawan Belanda. Unsur-unsur lain masyarakat di Indonesia meliputi golongan bangsawan, birokrat, dan golongan masyarakat petani. Semua unsur masyarakat dari setiap golongan, menolak hadirnya pemerintah Belanda di Indonesia.

II.2.1 Sikap Masyarakat Bangsawan dan Birokrat

Ketika Belanda datang ke Indonesia sistem masyarakat Indonesia pada saat itu berbentuk kerajaan-kerajaan Islam. Dalam usaha menerapkan sistem hukumnya di Indonesia, Belanda menemui tantangan dari golongan bangsawan dan birokrat kerajaan.

Golongan bangsawan ialah orang-orang yang masih merupakan keturunan dan keluarga Raja. Biasanya, anggota-anggota kerajaan itu juga bekerja pada kerajaan menjadi pegawai pemerintahan, disebut dengan kaum birokrat. Rakyat biasa apabila memiliki kemampuan yang baik dalam bidang pemerintahan dan loyalitas pada kerajaan juga bisa diangkat menjadi pegawai pemerintahan

Dalam kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, Belanda menemukan bahwa sistem yang dipakai dalam menjalankan pemerintahan ialah dengan berdasarkan aturan Islam, yang disebut dengan sistem Kesultanan, karena dipimpin oleh seorang Sultan. Dalam sistem kesultanan itu, mereka tidak melarang pelaksanaan kegiatan adat yang sudah ada sejak dahulu sebelum Islam sampai ke Indonesia, asalkan pelaksanaan kegiatan adat tersebut tidak bertentangan dengan aturan Islam yang ada di dalam al-Quran.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² Karel A. Steenbrink. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Usaha Belanda dalam menerapkan sistem hukumnya di Indonesia, mendapat perlawanan keras dari golongan bangsawan dan birokrat pemerintah. Karena Belanda berusaha mengganti sistem hukum yang ada dengan sistem hukum Belanda, yang berdasarkan pada paham Barat. Kondisi seperti itu menyebabkan banyak terjadinya perang yang dipimpin dan didukung oleh para bangsawan, seperti pada perang Diponegoro dan perang Banjar. Walaupun pada akhirnya, banyak juga orang-orang yang berasal dari golongan birokrat yang menyerah kepada Belanda dan memihak Belanda, karena Belanda membayar mereka dengan memberikan kehidupan yang penuh dengan harta, dan janji untuk memberikan kedudukan yang lebih tinggi dalam pemerintahan. Contohnya yang terjadi pada perang Banjar. Sultan Tamjidullah pada Kerajaan Banjar hanyalah merupakan anak dari seorang selir. Beliau ingin mendapatkan kedudukan sebagai Raja dan ingin menguasai Kerajaan Banjar, dengan bekerja sama pada Belanda.¹³ Orang-orang birokrat yang menyerah kepada Belanda dengan melakukan kerjasama dengan Belanda seperti itu ialah orang-orang yang keyakinan keagamaannya kurang kuat karena tidak menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan aturan Islam, sehingga dapat terpengaruh oleh Belanda.

II.2.2 Sikap para Ulama

Para ulama ialah orang-orang yang sangat memahami tentang perintah Allah di dalam al-Quran. Pemahamannya itu mereka sampaikan kepada seluruh masyarakat Islam di Indonesia. Biasanya mereka membuka sebuah sarana pendidikan dan pengajaran agama dalam sebuah pesantren. Sehingga mereka dapat dikatakan sebagai guru dalam sistem kemasyarakatan Islam.

Kehadiran Belanda, pada awalnya disambut dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama para ulamanya. Karena pada saat itu Belanda datang dengan sikap yang baik pula, dan tidak menampakkan tanda-tanda permusuhan dengan masyarakat Indonesia. Dalam Islam juga diajarkan untuk

¹³ Sartono Kartodirdjo. *Sejarah Perlawanan-perlawanan terhadap Kolonialisme*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1973.

bersikap baik kepada semua orang, walaupun ia tidak beragama Islam. Para ulama itu memilih sikap tidak mencampuri masalah akidah seseorang, asalkan orang itu juga tidak mencampuri urusan akidahnya. Seperti yang tercantum di dalam al-Quran surat al-Kafirun ayat 6, yang isinya:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ①

Artinya: “Untukmulah agamamu, dan utukkulah agamaku.” (QS. 109:6)

Bahkan dalam Islam diajarkan juga untuk berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Allah, yaitu dengan melestarikan alam dan menyayangi binatang.

Ketika Belanda sudah menampakkan sikap yang tidak baik, yaitu dengan mulai mencampuri urusan pemerintahan Islam, para ulama mulai memerangi mereka. Hukum Islam harus ditegakkan. Belanda sebagai penguasa kafir yang ingin mengganti hukum Islam di Indonesia, harus dilawan dan diusir dari Indonesia. Akhirnya para ulama itu mengajak seluruh umat Islam bangsa Indonesia untuk berperang melawan Belanda. Banyak juga perlawanan umat Islam kepada Belanda yang dipimpin oleh para ulama.

II.2.3 Sikap Masyarakat Petani

Ketika pemerintah Belanda berada di Indonesia, pemerintah Belanda mulai mengeluarkan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh para petani, dan sangat memberatkan petani, seperti pajak yang sangat tinggi yang harus ditanggung oleh petani, dan penanaman paksa beberapa jenis tanaman yang harus ditanam. Hal itu menyebabkan golongan petani yang terbebani dengan aturan-aturan yang dibuat Belanda itu memberontak dan melawan Belanda. Pada umumnya perlawanan itu timbul di tanah partikelir (*Particuliere Landerijen*).¹⁴ Tanah partikelir yaitu tanah yang dikuasai Belanda, bahkan segala apa yang ada di atasnya, termasuk orang-orangnya merupakan milik Belanda. Sehingga rakyat seolah-olah budak Belanda yang harus melakukan apapun yang diperintahkan oleh Belanda.

¹⁴ Sartono Kartodirdjo. *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid IV*. Jakarta: Depdikbud, 1975.

Tanah partikelir tersebut ada sebagai akibat dari praktik penjualan tanah yang dilakukan oleh orang Belanda semenjak zaman permulaan VOC. Tanah semacam ini terdapat di sekitar Batavia, Bogor, Karawang, Cirebon, dan Surabaya. Pada permulaan zaman VOC, tanah itu dihadiahkan kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman daerah di sekitar Batavia. Kemudian, dalam jumlah kecil ada yang diberikan kepada pribumi. Mereka yang menerima tanah dari Belanda itu kemudian bertindak sebagai tuan tanah yang memiliki hak untuk menguasai penduduk yang hidup di tanah tersebut dan menuntut penyerahan tenaga kerja beserta hasil tanahnya, bahkan dapat meminta apa saja yang dikehendaki.¹⁵

Dalam rangka kontak antara kebudayaan Barat dan kebudayaan Indonesia, pemberontakan-pemberontakan petani dapat dipandang sebagai gerakan protes terhadap masuknya perekonomian Barat yang tidak diinginkan dan terhadap pengawasan politik yang mengganggu tatanan masyarakat tradisional.¹⁶

Rakyat dalam golongan petani bertindak sebagai pengikut para pemimpin agama dan bangsawan dalam sebuah perlawanan. Mereka tidak bertindak sebagai pemimpin dalam suatu perlawanan, karena secara struktur dalam sistem pemerintahan, rakyat bertugas sebagai pelaksana dan wajib mentaati perintah yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin mereka.

II.3 Perlawanan Rakyat Indonesia terhadap Belanda Dilatar-belakangi Semangat Keagamaan

Berbagai macam perlawanan yang dilakukan masyarakat Indonesia, seperti Perang Paderi (1821—1827), Perang Diponegoro (1825—1830), Perang Aceh (1873—1903), dan lain-lain, tidak terlepas dari kaitannya dengan ajaran Islam. Pemerintah Belanda juga melihat bahwa banyaknya perlawanan tersebut, sebenarnya dilakukan oleh umat Islam bangsa Indonesia dengan dimotori oleh para haji dan ulama yang dianggap fanatik terhadap ajaran agama Islam. Para

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sartono Kartodirdjo. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

ulama Islam tersebut hendak mengembalikan ajaran agama Islam dalam menjalani sistem kehidupan ini dan bukannya dengan sistem Barat yang dibawa oleh Belanda. Maka mereka menolak masuknya sistem pemerintahan Belanda dengan melakukan perlawanan kepada pemerintah Belanda.

Perlawanan rakyat terhadap pemerintah Belanda, merupakan suatu bentuk pergerakan sosial keagamaan masyarakat Indonesia, disebabkan karena pengaruh Barat yang dibawa Belanda yang telah mengakibatkan perubahan tatanan masyarakat. Terjadinya peralihan dari sistem tradisional menjadi sistem modern, menyebabkan munculnya goncangan-goncangan sosial. Dilihat dari bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat Islam Indonesia, kebanyakan bersifat tradisional karena banyak juga perlawanan yang timbul tanpa adanya sistem koordinasi yang baik, atau dengan sistem koordinasi yang sifatnya terselubung, dan dengan semangat keagamaan berusaha mengembalikan sistem sosial masyarakat Barat menjadi sistem Islam.

Perlawanan yang dilakukan masyarakat Indonesia kepada Belanda berasal dari seluruh golongan masyarakat, baik golongan masyarakat bangsawan dan birokrat pemerintah, para ulama, dan masyarakat petani. Semua golongan masyarakat itu memiliki tujuan yang sama dalam menghadapi pemerintah Belanda, yaitu dengan membela sistem pemerintah Islam dan menolak masuknya pengaruh Barat. Jika dilihat dari asal kejadiannya, perlawanan rakyat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan dari pihak kerajaan, dan perlawanan masyarakat petani.

II.3.1 Perlawanan dari Kerajaan Islam.

Beberapa contoh perlawanan yang dilakukan oleh pihak Kerajaan dalam melawan kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia, di antaranya:

1. Perang Paderi

Perang Paderi berlangsung antara tahun 1821—1838 dalam melawan Belanda. Perang Paderi terjadi di Sumatera Barat dengan

dipimpin oleh para ulama. Tujuan dari perang tersebut adalah untuk memurnikan ajaran agama Islam, yaitu dengan membasmi adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan al-Quran dan Sunah Nabi.¹⁷ Sasaran dalam perang tersebut dapat dibagi dua, yaitu pertama tahun 1803—1821, perlawanan para ulama kepada kaum adat dengan corak keagamaan. Kaum adat dinilai sudah keluar dari ajaran agama Islam dengan banyak melakukan kegiatan yang dilarang dalam ajaran agama, sehingga ajaran Islamnya harus dibersihkan. Kedua, pada tahun 1821—1838, yaitu masa melawan Belanda dengan corak keagamaan dan patriotisme. Pemerintah Belanda membantu kaum adat dalam melawan kaum ulama Islam. Sebenarnya pemerintah Belanda memiliki niat untuk menerapkan kekuasaannya di Indonesia, dengan melawan kaum ulama yang sangat taat menjalankan perintah agama.

Istilah Paderi, sebagian ahli sejarah berpendapat, berasal dari kata *Padre* (bahasa Portugis), yaitu suatu istilah untuk menyebut orang suci atau ulama yang berpakaian putih. Sehingga, kata *Padre* (Paderi) dipakai sebagai sebutan untuk para ulama (Padre'). Jadi, maksud dari istilah Perang Paderi ialah perang Belanda dalam melawan para ulama.

Masyarakat pada Kerajaan Minangkabau sudah mulai memeluk Islam pada pertengahan abad ke-16. Sejak saat itu ada dua cara hidup yang berdampingan dengan damai dan saling menghormati, yaitu adat lama dan Islam. Dalam hukum adat, raja, bangsawan, dan para penghulu adalah orang-orang yang menjalankan peranan yang penting dalam pemerintahan adat. Kemudian dalam kalangan masyarakat adat Minangkabau mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, yang dibela oleh para pembesar-pembesar adat. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu seperti, minum-minuman keras, judi, madat, dan menyabung ayam. Melihat hal itu, para ulama ingin memperbaiki keadaan masyarakat agar kembali menjalankan kebiasaan-

¹⁷ Sartono Kartodirdjo. *Sejarah Perlawanan-Perlawanan terhadap Kolonialisme*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1973 Hal. 89.

kebiasaan yang baik, yaitu dengan menggunakan hukum Islam. Pada tahun 1802, tiga orang ulama Minangkabau yang baru saja pulang dari menjalankan ibadah haji, menegur kaum adat yang melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Ketiga orang ulama itu bernama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piabang¹⁸, berpendapat bahwa agama harus dibersihkan dari kebiasaan buruk adat jahiliyah.¹⁹ Atas nama hukum Islam, mereka melawan kebiasaan adat buruk tersebut. Maka, bertentanganlah adat dengan ulama. Sejak saat itu, banyak terjadi pertempuran antara adat dan ulama (kaum Paderi). Dalam perseteruan antara kaum adat dan kaum ulama tersebut sempat diupayakan untuk didamaikan antara kedua belah pihak, yang dilakukan oleh Tuanku Nan Tuo, seorang ulama keturunan Minangkabau yang terkenal moderat, namun usaha damai tidak berhasil dicapai.

Pada tahun 1818, Sumatra Barat dikuasai oleh Inggris. Para pemimpin adat meminta bantuan kepada Inggris untuk melawan kaum Paderi. Namun, Inggris harus segera menyerahkan daerah kekuasaannya kepada Belanda sebagai pelaksanaan perjanjian London.²⁰ Kemudian kekuasaan Inggris di Sumatra Barat diserahkan kepada Belanda. Kaum adat akhirnya meminta bantuan kepada Belanda dalam melawan kaum Paderi. Maka pada tanggal 10 Februari 1821, antara Belanda dengan kaum adat pada Kerajaan Minangkabau mengadakan perjanjian, yaitu secara bersama-sama melawan kaum ulama. Mulai saat itu, perlawanan kaum Paderi tertuju kepada Belanda, dan kaum adat pada saat itu hanya dijadikan sebagai alat Belanda dalam obsesinya menguasai Indonesia.

Perang Paderi melawan Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dimulai tahun 1821—1838 dan dibagi menjadi tiga masa. Masa yang pertama tahun 1821—1825 ditandai dengan meluasnya perlawanan

¹⁸ Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV*. Jakarta: Depdikbud, 1975. Hal. 141.

¹⁹ Ismail Ja'kub, *Sedjarah Islam di Indonesia*. Jakarta: Widjaja, 1972. Hal. 48.

²⁰ Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perlawanan-Perlawanan terhadap Kolonialisme*.

rakyat ke seluruh daerah Minangkabau. Masa yang kedua pada tahun 1825—1830 ditandai dengan sedikit redanya perang karena Belanda telah berhasil mengadakan perjanjian dengan kaum Paderi, juga karena Belanda tidak dapat mengerahkan pasukannya secara optimal berhubungan dengan adanya perlawanan rakyat yang lebih besar di Jawa. Masa ketiga pada tahun 1830—1838, ditandai dengan perlawanan yang lebih hebat dari kaum Paderi, karena Belanda banyak mengkhianati perjanjian yang pernah dibuat. Selain itu juga terjadi banyak penyerbuan besar-besaran dari pihak Belanda karena penumpasan perlawanan di Jawa telah usai, sehingga banyak pemimpin-pemimpin Paderi yang tertangkap.²¹

Pada akhirnya, pada tanggal 28 Desember 1838 pertahanan kaum Paderi dapat dijatuhkan. Belanda mengajak Tuanku Imam Bonjol untuk berunding dan berdamai. Ternyata ajakan untuk berdamai hanyalah tipuan Belanda. Pada saat dilakukan perundingan, Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dibuang ke Ambon. Sejak saat itulah Perang Paderi berakhir. Maka tertanamlah kekuasaan Belanda di seluruh Sumatera Barat.

Dalam perlawanan kaum Paderi terhadap Belanda dan kaum adat, motif agama sangat menonjol. Gerakan pemurnian yang dilancarkan oleh kaum Paderi, dipimpin oleh ulama-ulama yang berpengaruh terhadap masyarakat. Ulama-ulama tersebut adalah pemimpin-pemimpin yang langsung dapat menggerakkan pasukan-pasukan Paderi untuk melawan Belanda dan sekutunya. Dalam perlawanan kaum Paderi, loyalitas para pengikut ulama tersebut didasarkan pada ikatan keagamaan yang sangat kuat. Dalam hubungan ini, para ulama Paderi dipandang oleh para pengikutnya sebagai pejuang untuk menyelamatkan ajaran Islam dari pengaruh kepercayaan maupun tindakan-tindakan yang menyimpang.

²¹ *Ibid.*

2. Perang Diponegoro

Perang Diponegoro juga sering disebut dengan perang Jawa, karena perang tersebut terjadi antara pemerintah Belanda dengan keraton Yogyakarta, yaitu seluruh daerah Kerajaan Mataram di Jawa. Perang tersebut dinamakan Perang Diponegoro, karena dipimpin oleh putera raja Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono III, yang bernama Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro berlangsung sejak tahun 1825—1830. Perang tersebut pada awalnya berupa perang antar anggota kerajaan, dan sebagian besarnya juga merupakan perang anti kolonial Belanda, karena pihak Belanda selalu ikut campur dalam segala urusan di dalam keraton. Daerah yang bergejolak dalam melawan Belanda meliputi seluruh wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram.

Pada hakikatnya, Kerajaan Yogyakarta tidaklah sama dengan Kerajaan Mataram. Kerajaan Yogyakarta adalah hasil pembagian dari Kerajaan Mataram pada saat pemerintahan dipegang oleh raja Susuhunan Paku Bowono III. Pada saat beliau memerintah, Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Surakarta, dibawah Susuhunan Paku Buwono, dan Kerajaan Yogyakarta, dibawah Pangeran Ario Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Pembagian kerajaan ini dibicarakan di dalam Perundingan Giyanti pada tahun 1755, dengan disahkan oleh pihak ketiga, yaitu Belanda (VOC), yang diwakili oleh Gubernur Nicolaas Hastingh.²²

Belanda ikut dalam pengesahan Perjanjian Giyanti, karena telah terjadi perjanjian antara Susuhunan Paku Buwono II dengan Belanda pada tahun 1749, yang berisi penyerahan tanah Mataram kepada Belanda untuk diawasi. Perjanjian tersebut dibuat pada saat susuhunan dalam keadaan payah. Maksudnya, keadaan di dalam keraton pada waktu itu sedang tidak stabil. Maka, beliau menyerahkan tanah Mataram kepada Belanda, dan

²² *Ibid.* Hal. 123.

putera Mahkota yang pada waktu itu masih belum dewasa dititipkan dibawah perlindungan Belanda.

Secara adat dan kebiasaan orang-orang Jawa, apabila kita sedang dalam keadaan sakit payah, atau sedang dalam perjalanan jauh, maka semua harta benda miliknya, serta seluruh keluarganya hendaknya dititipkan kepada saudaranya yang lain, atau kepada sahabat terdekat. Dan penyerahan itu bukan berarti "menyerahkan" dalam arti yang sesungguhnya, melainkan sekedar dititipkan saja sebagai adat sopan santun orang Jawa. Maksud yang sebenarnya dari tradisi tersebut ialah menyuruh secara halus kepada sahabat terdekatnya tadi untuk mengakui hak miliknya dan menghormatinya sebagaimana mestinya.

Perjanjian yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dengan Belanda itu disambut dengan gembira oleh Belanda, karena Belanda sebenarnya memang memiliki misi politik, yaitu berusaha mengkonsolidasi kekuatannya di tanah Jawa.²³ Untuk mencapai tujuannya itu, Belanda berusaha mengurangi kekuatan raja-raja di tanah Jawa. Maka, perjanjian yang dibuatnya dengan Susuhunan Paku Buwono tersebut sejalan dengan misi Belanda.

Dalam perjanjian yang dibuat antara Belanda dengan raja Mataram tersebut terdapat salah pengertian pada pihak Belanda terhadap arti "menyerahkan tanah Mataram kepada Belanda". Belanda berpendapat bahwa dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan Kerajaan Mataram, Belanda merasa wajib untuk ikut campur tangan, termasuk dalam perjanjian Giyanti.

Keikut campuran Belanda berlanjut terhadap pemerintahan Kerajaan Yogyakarta, dan menyebabkan timbulnya banyak kekacauan di kalangan keraton, sehingga pecahlah Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825. Menurut Pangeran Diponegoro sendiri, keikut-campuran

²³ *Ibid.* Hal. 124.

Belanda dalam urusan pemerintahan di keraton bertentangan dengan adat pemerintahan keraton yang sebenarnya.

Sultan Hamengkubuwono I wafat pada tahun 1792, dan kepemimpinan Kerajaan Yogyakarta digantikan oleh putra mahkota yang bergelar Sultan Hamengkubuwono II. Sejak beliau memimpin pemerintahan, timbul ketegangan dan kekacauan di dalam keraton. Keadaan seperti itu didukung karena campur tangan Belanda dalam urusan pemerintahan. Keikutsertaan Belanda dalam pemerintahan kerajaan karena dibantu oleh Patih Sultan yang sekaligus menantu Sultan, bernama Raden Adipati Danurejo II, yang mengkhianati sultan dan lebih setia kepada Belanda. Hubungan erat dengan Belanda ini menyebabkan adat kebiasaan Belanda masuk ke dalam keraton dan mempengaruhi golongan muda dan bangsawan, seperti minum-minuman keras, pesta larut malam, dan lain-lain. Hal itu menyebabkan Kerajaan Yogyakarta menjadi alat Belanda dalam menguasai tanah Jawa. Untuk itu, Pangeran Diponegoro pergi meninggalkan keraton dan menetap di desa Tegalrejo bersama nenek buyutnya, yaitu Kanjeng Ratu Ageng, permaisuri Sultan Hamengkubuwono I. Pangeran Diponegoro hendak mendirikan pemerintahan sendiri dibawah pimpinan seorang Sultan, yang bebas dari campur tangan Belanda.²⁴

Setelah Pangeran Diponegoro meninggalkan keraton, keadaan pemerintahan semakin tidak tentram. Hal itu memberi kesempatan kepada Belanda untuk menanamkan kekuasaannya. Beberapa daerah kesultanan diserahkan oleh Sultan kepada Belanda, dan pajak daerah pantai yang seharusnya dibayar oleh Belanda kepada keraton menjadi dihapus. Belanda juga membuat peraturan baru, seperti peraturan yang memperbolehkan orang asing menyewa tanah secara besar-besaran. Selain tanah pertanian, jalan rayapun disewakan pula untuk diambil hasilnya

²⁴ Ismail Ja'kub, *Sejarah Islam di Indonesia*. Hal. 50.

yaitu dengan menarik pajak kepada semua barang-barang muatan yang dibawa melalui jalan itu. Belanda juga melemahkan perekonomian rakyat dengan memberi beban pajak dan berusaha memiliki tanah-tanah milik rakyat.

Belanda, dengan diwakili oleh Residen Yogyakarta A.H. Smissaert dan Patih Danurejo IV merencanakan pembuatan jalan raya yang kebetulan akan melintasi tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Dengan diam-diam, tanah itu telah diberi tonggak-tonggak oleh Belanda, dan pekerjaan jalan akan dilakukan oleh rakyat atas perintah dari Patih Danurejo IV. Setelah mengetahui hal itu, Pangeran Diponegoro mencabut tonggak-tonggak itu dan memasang rintangan pada jalan yang menuju Tegalrejo. Keesokannya, Belanda merusak rintangan-rintangan yang dibuat oleh Pangeran Diponegoro dan memasang kembali tonggak-tonggak di tanah tersebut. Keadaan itu berlangsung sampai berhari-hari dan menyebabkan kemarahan Pangeran Diponegoro, sehingga meletuslah perang antara Pangeran Diponegoro dengan Belanda.

Perang Diponegoro berlangsung sejak tahun 1825 sampai tahun 1830 dan termasuk perang yang sangat besar yang harus dihadapi Belanda. Sampai pada tahun 1830, akhirnya Belanda berhasil mengajak Pangeran Diponegoro untuk membuat perundingan. Pada tanggal 17 Februari 1830, Letnan Kolonel Cleerens menjemput Pangeran Diponegoro untuk mengadakan perundingan dengan Belanda. Pada tanggal 28 Maret 1830 terjadi perundingan antara Pangeran Diponegoro dengan Belanda yang dipimpin oleh Jendral De Kock, dan berlangsung di Karesidenan Magelang. Dalam perundingan tersebut, Pangeran Diponegoro menyatakan kepada Belanda keinginannya untuk mendirikan negara merdeka dibawah kepemimpinan seorang sultan, dan hendak menjadikan Amirul Mukminin di seluruh Jawa sebagai kepala masyarakatnya.²⁵

²⁵ *Ibid.* Hal. 51.

Namun permintaan tersebut ditolak Belanda, dan perundingan menemui jalan buntu. Kemudian Pangeran Diponegoro ditangkap lalu dibawa ke Semarang kemudian ke Batavia. Setelah tertangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Belanda maka berakhirlah Perang Diponegoro.

Di dalam perlawanan Diponegoro tersebut, kepemimpinan banyak dipegang oleh golongan bangsawan. Di samping itu, perlawanan juga banyak yang dipimpin oleh para ulama. Para pemimpin yang berasal dari golongan bangsawan itu, juga merupakan orang-orang yang taat beragama, dan perlawanan yang ditujukan kepada pemerintah Belanda dalam rangka menegakkan sistem hukum Islam, yang sudah sejak dahulu dianut dalam sistem pemerintahan kesultanan.

Setelah Pangeran Diponegoro melaksanakan perlawanan kepada pihak pemerintah Belanda, datang dukungan kepadanya yang berasal dari para bangsawan istana. Demikian pula para ulama yang bergabung dengan pasukan Diponegoro, akhirnya diikuti oleh para santri dan orang-orang yang bersimpati kepada para ulama tersebut.

3. Perang Aceh

Perang Aceh dimulai pada tahun 1873 dan terjadi di Aceh. Sebab terjadinya perang Aceh yaitu, karena Belanda ingin menguasai seluruh wilayah Sumatra dan menyebabkan terancamnya integritas Kerajaan Aceh. Dalam “Traktat Sumatera” (tahun 1871), yang ditandatangani oleh Belanda dan Inggris, menyatakan bahwa “Belanda bebas memperluas kekuasaannya di seluruh Pulau Sumatra”.²⁶ Berdasarkan Traktat Sumatera tersebut, berarti Belanda tidak berkewajiban lagi untuk menghormati kedaulatan dan integritas kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh menjadi terancam dengan adanya Traktat itu. Akhirnya, kedatangan Belanda di Aceh disambut dengan perlawanan oleh rakyat Aceh.

²⁶ Departemen P dan K. *Perang Kolonial Belanda di Aceh, The Dutch Colonial War in Aceh*. Banda Aceh, 1977. Hal. 22.

Pada tanggal 26 Maret 1873, Kerajaan Belanda menyampaikan manifesto perang kepada Kerajaan Aceh, setelah ultimatum dari Belanda yang berisi tuntutan agar Aceh mengakui kedaulatan Belanda tidak mendapat jawaban yang memuaskan bagi Belanda. Akhirnya pada tanggal 8 April 1873 Belanda tiba di perairan Aceh bersama Angkatan Bersenjata Belanda²⁷, dan meletuslah perang Aceh.

Agresi yang dilancarkan Belanda tersebut menimbulkan ketegangan di kalangan masyarakat Aceh. Tuanku Hasyim, salah satu pemimpin Aceh, menyerukan agar tanah Aceh dipertahankan mati-matian. Jalan yang harus ditempuh untuk mengatasi ketegangan yang disebabkan oleh serangan pihak Belanda itu ialah dengan cara bertempur melawan musuh yang dianggap merusak sendi-sendi agama Islam. Karena di dalam sistem masyarakat Aceh, nilai-nilai keagamaan memainkan peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, agama dan politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Para ulama berupaya agar umat Islam dapat dididik dengan berbagai cara sehingga mampu memiliki motivasi yang kuat dalam mengusir Belanda dari tanah Aceh. Para pemimpin agama tersebut menjadikan al-Quran sebagai sumber hukum yang tertinggi dalam agama Islam, sehingga mewajibkan setiap muslim untuk berperang dijalan Allah dalam melawan kekuasaan orang kafir.

Pertempuran yang menyebar di berbagai wilayah di Aceh, membuktikan bahwa perlawanan rakyat Aceh cukup sulit untuk ditaklukan oleh Belanda dalam waktu yang singkat. Akhirnya Belanda menyadari bahwa penaklukan Aceh dengan kekuatan senjata tidak akan berhasil. Belanda menggiatkan usahanya untuk memikat pemimpin-pemimpin perjuangan Aceh. Beberapa pemimpin Aceh ada yang menyerah, dan

²⁷ Ibrahim Alfian, *Sastra Perang, Sebuah pembicaraan mengenai Hikayat Perang Sabil*, hlm. 10.

sebagiannya lagi tetap berkeyakinan kuat dalam soal agama dan tidak dapat dilunakkan oleh Belanda.

Untuk menaklukkan Aceh, Belanda akhirnya menempuh jalan lain, yaitu ingin mengetahui rahasia kekuatan aceh, terutama yang menyangkut kehidupan sosial-budayanya. Snouck Hurgronje yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam dan pernah mempunyai pengalaman bergaul dengan orang-orang Aceh yang melaksanakan ibadah haji ke Makkah, mendapatkan tugas dari pemerintah Belanda untuk meneliti sistem kemasyarakatan Aceh. Dari hasil penelitian Snouck Hurgronje tersebut, didapat keterangan bahwa Sultan Aceh tidak dapat berbuat apa-apa apabila tidak mendapat persetujuan dari kepala-kepala agama yang secara struktur ada di atasnya. Itulah yang dimaksud dengan hubungan antara Sunan dan Sultan dalam struktur pemerintahan Aceh.

Berdasarkan tulisan Snouck Hurgronje, pemerintah Belanda mendapat petunjuk, bahwa satu-satunya jalan yang baik untuk mengalahkan Aceh, yaitu dengan memecah belah kekuatan yang ada di dalam masyarakat Aceh. Kaum ulama yang memimpin perlawanan akan dihadapi dengan kekuatan senjata. Di samping itu, Belanda akan membuka kesempatan bagi bangsawan Aceh untuk masuk dalam pegawai pamong praja pemerintah Belanda. Sedangkan golongan rakyat diharapkan akan merasa terikat pada Belanda dan menjauh dari golongan ulama.²⁸

Perang yang dilakukan rakyat Aceh dalam melawan Belanda diberi nama *Prang Beulanda* (Perang Belanda), *Prang Gōmpeuni* (Perang Kompeni), *Prang Sabi* (Perang Sabil), dan *Prang Kaphé* (Perang Kafir),²⁹ maksudnya pemerintah Belanda dianggap pemerintah kafir karena tidak seagama dengan orang Aceh, maka harus diperangi, dan apabila tentara Islam mati dalam peperangan tersebut dianggap mati syahid.

²⁸ Sartono Kartodirdjo, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV*. Hal. 213.

²⁹ Departemen P dan K. *Perang Kolonial Belanda di Aceh, The Dutch Colonial War in Aceh*. Hal. 24.

Dalam perlawanan rakyat Aceh kepada pemerintah Belanda, pimpinan perang terutama dipegang oleh kepala-kepala daerah, seperti panglima dan uleebalang, maupun tokoh-tokoh dari golongan agama. Para uleebalang termasuk pejabat birokrat, dan dengan kekuasaannya yang besar, dapat dengan mudah mengerahkan pengikut yang berasal dari rakyat. Pemimpin-pemimpin pasukan perang terhadap Belanda yang dipegang oleh para kepala daerah maupun para pemimpin agama, mendasari ikatan politik dan ikatan keagamaan masyarakat Aceh yang sangat kuat.

Dalam buku yang berjudul *De Atjehoorlog*, yang ditulis oleh Paul van t' Veer, perang Belanda melawan Aceh tersebut dianggap sebagai sebuah peperangan besar dan dahsyat yang berlangsung terus-menerus sejak tahun 1873 sampai saat Belanda mengundurkan diri dari Aceh untuk selama-lamanya pada tahun 1942. G.B Hooyer juga menyatakan dalam bukunya, bahwa jika dibandingkan dengan perang-perang kolonial yang lain di Indonesia, perang Aceh adalah perang terberat yang harus dihadapi oleh Belanda. Karena orang-orang Aceh dianggap lebih fanatik dengan agama Islamnya dan lebih cinta kepada kemerdekaannya, sehingga mereka lebih berani dan lebih gigih dalam melawan Belanda.

4. Perang Banjar

Pada tahun 1859, di Banjarmasin terjadi suatu pemberontakan terhadap Sultan Tamjidullah II, yang menjabat sebagai Raja di Kerajaan Banjar sejak tahun 1857. Terjadinya perang Banjar diawali ketika putera mahkota, yang bernama Pangeran Abdulrahman, meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 1853. Keluarga istana mencalonkan Pangeran Hidayat sebagai pengganti raja. Sedangkan residen mengajukan Pangeran Tamjidullah. Pada saat itu terjadi perselisihan antara keluarga kerajaan dengan residen. Tujuan residen mencalonkan Pangeran Tamjidullah sebagai pengganti raja ialah karena Pangeran Tamjidullah memihak

kepada Belanda, dan ia bersedia menyerahkan daerah pertambangan kepada Belanda.

Pada saat itu pemerintahan Kerajaan Banjar dipimpin oleh Sultan Adam. Ia secara diam-diam mengambil keputusan sendiri dalam menetapkan siapa penggantinya kelak. Ia menetapkan Pangeran Hidayatullah yang berhak menggantikannya sebagai raja. Namun, Gubermenen membuat keputusan sendiri dengan menetapkan Pangeran Tamjidullah sebagai raja, dan Pangeran Hidayatullah ditetapkan sebagai mangkubumi. Keputusan tersebut mendapat pertentangan dari rakyat, karena selain Pangeran Tamjidullah adalah putera dari selir yang berasal dari kalangan rendah, ia juga memiliki sikap dan tabiat yang buruk yang tidak disukai rakyat.

Pengangkatan Sultan Tamjidullah menjadi pemimpin Kerajaan Banjar dilakukan oleh Belanda, karena Pangeran Tamjidullah sangat setia kepada Belanda sehingga dapat membantu usaha Belanda dalam menguasai Indonesia. Setelah pengangkatan itu, muncul pertentangan dari pihak intern kerajaan. Pengangkatan tersebut juga menimbulkan kekecewaan pada diri rakyat Banjar, karena melihat Pangeran Hidayat lebih berhak menggantikan kedudukan Sultan Adam, daripada Pangeran Tamjidullah.

Sultan Tamjidullah memimpin pemerintahan Kerajaan Banjar dengan tidak baik. Ia membuat kerusuhan di daerah tambang Pangarong dan Kalangan, dengan maksud untuk menjatuhkan Pangeran Hidayatullah sebagai mangkubumi. Dalam menjalankan pemerintahannya, Pangeran Tamjidullah bekerjasama dengan Belanda, sehingga Belanda memanfaatkan Pangeran Tamjidullah dalam menguasai Banjarmasin. Maka timbullah pergerakan perlawanan rakyat kepada kerajaan yang sudah dikendalikan oleh Belanda, dengan dipimpin oleh Pangeran Antasari, dan menjadi pertanda pecahnya Perang Banjar.

Perlawanan rakyat yang ditujukan kepada pemerintah Belanda pada umumnya dipimpin oleh para ulama dan para haji. Peristiwa tersebut dijiwai oleh semangat keagamaan, sehingga perjuangan rakyat dalam melawan pemerintah asing yang mengganggu kedaulatan Kerajaan Banjar adalah sebuah bentuk usaha jihad. Di bawah pimpinan kaum ulama, rakyat mengadakan perlawanan-perlawanan yang sangat fanatik. Penyerangan terhadap pihak Belanda yaitu dengan melakukan "beratip dan beamal", maksudnya ialah bersembahyang dan berdoa bersama-sama. Tujuan mereka dalam hubungannya dengan perjuangan ini ialah supaya memperoleh karunia Tuhan dan kekebalan diri dalam rangka memerangi orang kafir yang sedang mengancam negeri dan agama mereka untuk kemudian mendatangkan perdamaian, dan mengembalikan Sultan Banjar di atas tahtanya.³⁰ Rakyat yang merasa pelaksanaan pemerintahan Banjar sudah tidak sesuai lagi dengan tata cara pemerintahan yang sebenarnya, ingin mengembalikan sistem kesultanan Banjar pada posisinya yang sebenarnya, dan tanpa campur tangan dari pihak lain, yaitu Belanda.

Pada perang Banjar, kepemimpinan dipegang oleh golongan bangsawan, ulama, dan pejabat birokrat. Selain golongan bangsawan, para ulama juga memiliki peranan yang sangat penting dalam memimpin perlawanan. Mereka dapat menarik pengikut yang berasal dari para santri yang berasal dari pengajaran agama mereka.

Pada dasarnya, perlawanan yang dilakukan oleh seluruh golongan masyarakat Banjar itu menuntut keadaan seperti sebelum kedatangan Belanda. Faktor agama juga merupakan salah satu motif dasar kepemihakan kaum ulama kepada perlawanan terhadap Belanda. Ulama-ulama pedalaman yang kuat kepercayaannya, memiliki motif keagamaan yang sangat mendasar dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda,

³⁰ Sartono Kartodirdjo. *Sejarah Perlawanan-perlawanan terhadap Kolonialisme*. Hal. 193.

seperti "Gerakan Beatip dan Beamal" tersebut, yang timbul di daerah Amuntai menjelang akhir tahun 1861.

II.3.2 Perlawanan Masyarakat Petani

1. Peristiwa Garut

Peristiwa Garut terjadi di Desa Cikedal pada tanggal 7 Juli 1919. Pada saat itu pemerintah Belanda menetapkan aturan kepada para petani bahwa petani harus menjual hasil panennya berupa padi sebanyak empat pikul per bahu sawah dari hasil padi yang dihasilkannya kepada Belanda dengan harga f. 4; per pikul. Pada saat itu harga padi setempat ialah f. 7.50; per pikul. H. Hasan, salah seorang petani yang memiliki 10 bahu sawah dengan hasil 250 pikul, harus menjual 42 pikul kepada Belanda. H. Hasan merasa keberatan dengan ketentuan tersebut dan mengajukan permohonan kepada Belanda, yaitu agar hanya menjual satu pikul per bahu. H. Hasan lalu menolak menerima uang muka pembelian padi dengan jumlah dan harga yang ditentukan Belanda. Telah dikatakan oleh pemerintah Belanda, bahwa pembelian tersebut atas perintah dari pemerintah kolonial Belanda dan kalau tidak ditaati maka padinya akan disita.

H. Hasan tetap tidak mau mengikuti perintah Belanda. Sehingga pada tanggal 7 Juli 1919 H. Hasan ditangkap. Setelah terjadi pembicaran selama dua jam dengan pemerintah Belanda, akhirnya H. Hasan diperintahkan agar ikut ke Garut. Tetapi H. Hasan malah masuk ke dalam rumahnya dan mulai berzikir dengan para pengikutnya yang lain. Pemerintah Belanda memberi peringatan dengan memberikan tembakan *salvo* sebanyak dua kali tembakan. Namun, mereka yang di dalam rumah H. Hasan tetap berzikir. Akhirnya, tembakan yang ketiga diarahkan ke rumah H. Hasan, menyebabkan H. Hasan dan beberapa orang lainnya meninggal.

2. Perlawanan Petani Banten

Perlawanan petani terhadap pemerintahan Belanda di Banten terjadi pada tanggal 9 sampai 30 Juli 1888, dan terjadi di distrik Anyer, yaitu terletak di ujung Barat Laut Pulau Jawa.³¹ Pemberontakan tersebut mulai berlangsung pada dini hari tanggal 9 Juli 1888 di Cilegon. Terjadinya peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindakan yang tiba-tiba dari pihak petani yang tidak tahu apa-apa, tetapi dimotori oleh para ulama dan para haji yang fanatik terhadap ajaran agama Islam. Sasaran pemberontakan tersebut pada dasarnya ditujukan kepada pemerintah Belanda. Namun, golongan pegawai negeri yang memihak kepada Belanda, ikut sebagai korban dalam luapan kebencian rakyat terhadap peraturan-peraturan pemerintah.

Pada umumnya, hubungan sosial masyarakat Banten terbagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan bangsawan, golongan petani, dan golongan elit agama. Dengan hadirnya pemerintah Belanda yang membawa kebudayaan Barat, menciptakan perpecahan sosial yang tajam antara golongan-golongan tersebut, bahkan telah melahirkan golongan sosial baru, yaitu kaum birokrat (pegawai negeri), yang setuju dengan sistem modernisasi yang dibawa oleh Belanda. Kaum bangsawan pada mulanya memiliki kekuasaan politik yang kuat terhadap rakyat. Namun, kekuasaan tersebut merosot kedudukannya dengan digantikan oleh kedudukan kaum birokrat tersebut. Kaum agama merasa tersingkir dengan meningkatnya pengawasan politik dari pihak Belanda. Kekuasaan Belanda yang sudah berdiri kokoh menyebabkan sulitnya bagi kekuatan-kekuatan tradisional seperti kaum bangsawan dan elit agama tersebut untuk mempertahankan pengaruh mereka atas masyarakat. Cara yang ditempuh

³¹ Sartono Kartodirdjo. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Hal. 13.

adalah dengan memobilisasi kaum petani untuk melawan kekuasaan Belanda.

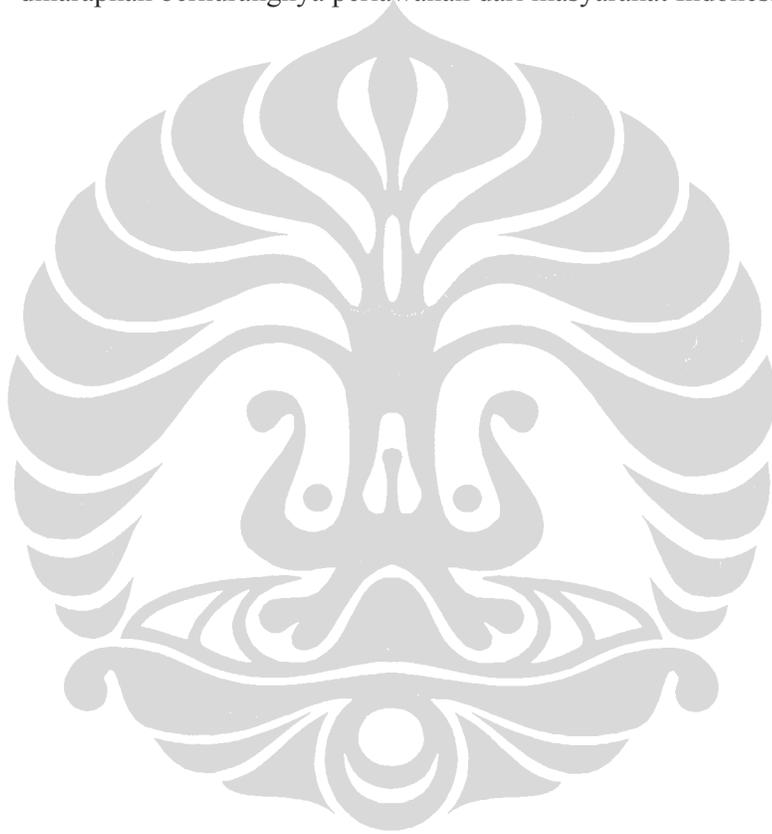
Adanya kekuasaan Belanda terhadap sistem politik di Banten telah menimbulkan suatu situasi politik yang tidak stabil di dalam masyarakat Banten. Pemerintah Belanda telah memaksakan peraturan-peraturan baru kepada rakyat dan berusaha membangun suatu sistem birokrasi baru.³² Contoh peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah Belanda adalah dengan memberikan peraturan pajak yang memberatkan bagi para petani.

Aspek agama juga merupakan salah satu pemicu terjadinya pemberontakan. Pada abad ke-19 terjadi suatu kebangkitan agama yang meluas di seluruh Pulau Jawa, bahkan di seluruh wilayah Nusantara. Terjadinya kebangkitan agama tersebut dipacu oleh meningkatnya jumlah orang yang naik haji, meningkatnya kegiatan orang-orang yang berdakwah dari satu tempat ke tempat lain, dan berdirinya sekolah-sekolah agama. Kebangkitan agama ini mampu membentuk kelompok-kelompok revolusioner yang militan dalam usaha menggulingkan kekuasaan Pemerintah Belanda di Indonesia. Kaum agama menentang modernisasi yang dibawa oleh Belanda dan berusaha mencegah perubahan sosial di Banten. Nilai-nilai agama digunakan untuk memperkuat nilai-nilai tradisional untuk melawan pengaruh-pengaruh Barat yang mengganggu keefektifan norma-norma tradisional.

Perlawanan-perlawanan yang telah dipaparkan di atas, tidak terlepas dari pengaruh ajaran agama Islam, dan dipimpin oleh ulama-ulama Islam yang taat beragama. Hal itu membuktikan bahwa dalam Islam sebenarnya tidak terlepas antara agama dan politik. Pemimpin agama juga merupakan pemimpin dalam urusan pemerintahan.

³² *Ibid.* Hal. 35.

Masuknya pemerintah Belanda yang mencoba menguasai Indonesia dengan menerapkan sistem pemerintahannya di Indonesia, mendapat perlawanan yang sangat kuat dari masyarakat Islam di Indonesia. Dalam menghadapi perlawanan-perlawanan dari masyarakat Islam Indonesia tersebut, maka harus dilakukan pemisahan antara agama dan politik dalam Islam. Sehingga para ulama dan pemimpin agama tidak lagi mengurus masalah-masalah politik. Dan diharapkan berkurangnya perlawanan dari masyarakat Indonesia.



BAB III

Pemisahan Agama dan Politik dalam Islam di Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda

III.1 Masa Sebelum Kedatangan Snouck Hurgronje

Agama Islam adalah agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Dalam usaha menguasai Indonesia, Belanda selalu berhadapan dengan masyarakat Islamnya. Pada awalnya, dalam menghadapi Islam di Indonesia, pemerintah Belanda mengambil tindakan untuk tidak ikut campur dalam segala macam urusan Islam, karena pada saat itu pemerintah Belanda kurang memiliki pengetahuan tentang Islam.

Tidak mau ikut campurnya pemerintah Belanda terhadap urusan Islam ialah karena Belanda merasa takut dengan Islam. Belanda mengira bahwa Islam sama dengan Katolik. Belanda menganggap umat Islam di Indonesia memiliki hubungan dengan ke-Khalifahan Turki Usmani, sama halnya dengan agama Katolik, yaitu umat Katolik di segala penjuru dunia memiliki hubungan dengan Paus di Roma, dan segala macam permasalahan yang menyangkut umat Katolik tersebut, akan diselesaikan dengan tanggung jawab Paus di Roma. Untuk itu Belanda memilih sikap untuk tidak ikut campur terhadap urusan Islam, karena takut akan mendapat ancaman dari Khalifah Turki apabila Belanda mengusik ketenangan umat Islam yang ada di Indonesia. Selain belum memiliki pengetahuan yang jelas mengenai Islam, pemerintah Belanda juga masih belum mengetahui tentang sistem sosial Islam.

Pada awalnya, dalam menghadapi Islam di Indonesia, pemerintah Belanda belum mempunyai kebijaksanaan yang jelas mengenai urusan yang berhubungan dengan Islam. Kebijaksanaan untuk tidak mencampuri urusan agama Islam

tersebut, pada kenyataannya tidak memiliki garis kerja yang jelas. Pada tahun 1859, Gubernur Jendral dibenarkan untuk mencampuri masalah agama, bahkan harus mengawasi setiap gerak-gerik para ulama, bila dianggap perlu demi kepentingan ketertiban dan keamanan.³³ Ketakutan Belanda terhadap Islam muncul karena pada kenyataannya Islam seringkali melakukan perlawanan kepada pemerintah Belanda yang dapat menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia. Islam dilihat memiliki fungsi sebagai titik pusat identitas yang melambungkan perlawanan terhadap pemerintah asing dan beragama Kristen, yang ingin menguasai Indonesia. Pemerintah Kristen tersebut adalah pemerintahan kafir yang harus dilawan, karena berusaha untuk mengambil alih wilayah kekuasaan Islam.

Banyaknya perlawanan-perlawanan rakyat Indonesia kepada pemerintah Belanda membuat ketakutan Belanda terhadap kekuatan Islam menjadi semakin besar. Pemerintah Belanda terus mencari jalan keluar dalam usaha menguasai wilayah Indonesia. Maka di hampir seluruh lembaga pendidikan di Negeri Belanda, dilakukan kajian dalam mempelajari Islam.

Banyaknya perlawanan yang dilakukan masyarakat Islam Indonesia tersebut, mengharuskan pemerintah Belanda melakukan pemisahan antara agama dan politik dalam Islam. Setelah terjadinya pemisahan tersebut, diharapkan masyarakat Islam yang fanatik terhadap agama, tidak akan mencampuri urusan politik, sehingga perlawanan terhadap pemerintah Belanda akan dapat ditekan dan diatasi. Pemerintah Belanda tidak bisa mentolerir timbulnya gerakan-gerakan fanatisme Islam yang dinilainya dapat menggoyahkan kekuasaan Belanda di Indonesia.

³³ Keputusan Raja tanggal 4 Februari 1859 no. 78, berbunyi: "Gubernur Jendral yang memegang prinsip bahwa pemerintah tidak boleh mencampuri urusan agama, boleh mencampurinya bila dipandang perlu untuk memelihara ketenangan dan ketertiban umum", baca Aqib Suminto. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1985. Hal. 10.

III.2 Masa Setelah Kedatangan Snouck Hurgronje ke Indonesia

III.2.1 Snouck Hurgronje

Untuk membantu dalam menghadapi Islam di Indonesia, pemerintah Belanda mendatangkan seorang sarjana Belanda yang sangat memahami tentang Islam, yaitu Christiaan Snouck Hurgronje. Ia adalah seorang sarjana Belanda yang mempelajari tentang Teologi Islam dan Sastra Arab di Universitas Leiden, Belanda. Ia mencapai gelar Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Het Mekaansche Feest* (Perayaan Mekkah). Yang dimaksud Perayaan Mekkah itu ialah pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan setiap tahun oleh umat Islam. Ia juga pernah bermukim (*muqim*) di Mekkah selama setahun, dengan nama Abdul Ghoffar, untuk mempelajari kehidupan masyarakat Islam langsung di pusatnya. Pada saat berada di Makkah (*muqim*), Snouck Hurgronje bertemu dengan banyak ulama-ulama Islam dari berbagai penjuru dunia, termasuk ulama dari Indonesia. Dengan melakukan hubungan dengan ulama-ulama itu, Snouck akhirnya juga mempelajari tentang masyarakat Islam di banyak Negara, juga sistem kemasyarakatan Islam di Indonesia. Ia sangat tertarik dengan kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, dan ingin datang ke Indonesia untuk mempelajari secara langsung sistem masyarakat Islam di Indonesia.

Sekembalinya dari bermukim di Makkah, Snouck mengajukan kepada pemerintah Belanda di Negeri Belanda untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat Islam di Indonesia. Akhirnya pada tahun 1889, Snouck Hurgronje sampai ke Indonesia dengan izin melakukan penelitian. Oleh pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, Snouck diangkat sebagai *Adviseur voor Inlandsche zaken*, yaitu penasehat untuk mengurus masalah-masalah ketimuran dan bahasa Arab, karena ia memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam. Pemerintah Hindia Belanda juga meminta kepada Snouck Hurgronje untuk membantu pemerintah Belanda dalam menghadapi masyarakat Indonesia, yang mayoritasnya adalah beragama Islam.

Snouck Hurgronje juga telah berhasil melawan ketakutan Belanda selama

ini tentang Islam. Ia menegaskan bahwa dalam Islam tidak dikenal lapisan kependetaan semacam dalam Katolik, seperti yang dahulu ditakutkan Belanda. Ia juga menegaskan bahwa pada hakekatnya orang Islam ialah orang-orang yang penuh dengan damai, namun, Islam juga memiliki kemampuan politik yang fanatik. Apabila mereka menemukan kekuatan lain yang dianggap mengganggu ketentraman masyarakat Islam, maka kekuatan lain tersebut wajib dilawan oleh seluruh umat Islam. Yang dimaksud kekuatan lain itu adalah kekuatan yang berasal dari orang-orang yang tidak seagama dengan mereka, yaitu kekuatan orang-orang kafir. Menurut Snouck Hurgronje, musuh Belanda yang sedang dihadapi bukanlah Islam sebagai doktrin agama, melainkan Islam dalam hal politik.

Makin banyak terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang dilatarbelakangi semangat keagamaan, mengharuskan pemerintah Belanda untuk menemukan cara dalam menghadapi Islam di Indonesia, supaya pemerintah Belanda dapat menerapkan sistem hukumnya di Indonesia. Atas usul yang diberikan oleh Snouck Hurgronje, akhirnya pemerintah Belanda melakukan pemisahan antara agama dan politik dalam Islam dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya perlawanan dari masyarakat Islam kepada pemerintah Belanda. Belanda berpikir, jika agama dan politik dipisahkan dalam Islam, maka para ulama yang fanatik terhadap agama, tidak akan lagi mencampuri urusan politik, sehingga tidak akan ada lagi pemberontakan dalam melawan pemerintah Belanda di Indonesia.

III.2.2 Politik Islam Hindia Belanda

Pada dasarnya, dalam Islam terdapat ajaran untuk menjalankan seluruh aspek kehidupan umat manusia. Seorang umat dalam menjalankan kehidupannya harus berada di dalam sebuah sistem kehidupan. Di dalam sistem kehidupan itu terdapat urusan agama (hubungan langsung dengan Tuhannya); urusan sosial kemasyarakatan, yaitu segala macam aktivitas yang berhubungan dengan manusia lain, seperti perkawinan, budaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan teknologi;

dan urusan politik, yaitu urusan pemerintahan, yang juga merupakan bentuk hubungan dengan manusia lain. Dalam Islam, semuanya itu diatur di dalam al-Quran. Walaupun hampir 90% kehidupan manusia yang dijalankan sehari-harinya ialah bentuk aktivitas yang berhubungan dengan manusia lain, namun masyarakat Islam tetap menjalaninya berdasarkan perintah Allah di dalam al-Quran.

Setelah mengetahui tentang sistem Islam tersebut, maka pemerintah Belanda membagi aspek kehidupan Islam dalam arti "ibadah", dengan Islam sebagai "kekuatan politik". Dalam menghadapi Islam di Indonesia, pemerintah Belanda mengeluarkan beberapa kebijaksanaan, yang dikenal dengan istilah *Islam Politiek*, dan Snouck Hurgronje merupakan orang yang membantu pemerintah Belanda dalam menetapkan kebijaksanaan tersebut.

Berdasarkan sistem kehidupan umat Islam yang telah dipelajarinya, Snouck Hurgronje membagi permasalahan Islam dalam tiga kategori, yaitu³⁴:

- 1) bidang agama murni (ibadah),
- 2) bidang sosial kemasyarakatan, dan
- 3) bidang politik / ketatanegaraan.

Dalam menghadapi Islam di masing-masing bidang, alternatif pemecahan yang dilakukan pun berbeda-beda. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dalam menghadapi ketiga bidang permasalahan dalam Islam tersebut juga berbeda-beda.

1. Bidang agama murni (ibadah) dan Kristenisasi

Pada dasarnya, pemerintah Belanda memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya, sepanjang yang dilakukannya itu tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. Ajaran agama yang dimaksud ialah segala macam aktivitas ibadah yang dilakukan secara ritual, seperti melaksanakan rukun Islam, mengerjakan salat lima waktu, melakukan ibadah puasa, dan segala macam aktivitas yang hubungannya langsung

³⁴ Aqib Suminto. *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoort voor Inlandsche Zaken*.

kepada Allah swt., sebab menjalankan aktivitas keagamaan ini tidak berbahaya bagi pemerintah Belanda.

Kebijaksanaan pemerintah Belanda yang menyatakan netral terhadap bidang agama tersebut dijalankan berdasarkan undang-undang Belanda yang tercantum dalam Undang-Undang Belanda untuk negara jajahan, yaitu pada RR (*Regeering Regliment*) no. 78 ayat 119 tahun 1855, yaitu mengakui kemerdekaan beragama dan menyatakan netral dalam masalah agama, kecuali bila aktivitas agama tersebut dinilai mengganggu ketertiban keamanan.³⁵

Pemerintah Belanda memberikan kebebasan kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah agamanya yang dilakukan secara ritual, karena pelaksanaan ibadah dinilainya tidak akan membahayakan kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia. Seorang umat yang sedang melaksanakan salat, tidak mungkin melakukan pembunuhan pada saat yang bersamaan.

Belanda, yang juga menganut paham pemikiran Barat, sangat menjunjung tinggi hak seorang umat beragama untuk berdoa kepada Tuhannya. Untuk itu, maka pemerintah Belanda memberi kebebasan kepada umat Islam yang hendak menjalankan ibadah ritualnya. Selain alasan-alasan tersebut, Belanda juga masih mewaspadaikan akan terjadinya perlawanan umat Islam, karena takut dianggap bahwa Belanda menghalang-halangi mereka dalam menjalankan perintah Tuhannya.

Pengertian netral yang dimaksud ialah tidak memihak dan tidak campur tangan sama sekali terhadap segala sesuatu yang menyangkut urusan agama tersebut, atau bisa juga membantu kesemuanya secara seimbang tanpa mencampuri urusan intern agama tersebut. Tetapi pernyataan netral terhadap agama yang telah ditetapkan pemerintah Belanda terhadap Islam berbeda antara teori dan praktiknya. Kebijakan pemerintah Belanda terhadap Islam lebih tepat dikatakan campur tangan daripada netral. Titik berat tekanannya adalah

³⁵ Arsip UB no. 1803, A21, Leiden. Beslit Raja no.78, tanggal 4 Februari 1859, ayat 80. Baca Aqib Suminto. *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche Zaken*. Hal. 26.

dalam menjaga *rust en orde*, yaitu ketertiban dan keamanan.³⁶ Dalam hal mencampuri masalah agama atau tidak, kebijaksanaan pemerintah Belanda bergerak diantara dua titik, yaitu "netral" dan "ketertiban keamanan". Disamping memberikan kebebasan dalam masalah agama, pemerintah Belanda juga melaksanakan pengawasan ketat terhadap segala macam aktivitas agama Islam, selama hal itu menyangkut kepentingan umum.

Selain selalu ikut campurnya pemerintah Belanda terhadap segala macam urusan dalam agama Islam, pernyataan netral tersebut juga tidak terealisasi dalam memperlakukan agama Islam jika dibandingkan dengan terhadap agama Kristen. Pada kenyataannya sering terjadi diskriminasi dalam kebijaksanaan yang berhubungan dengan agama. Hal itu dikarenakan hubungan pemerintah Belanda yang beragama Kristen dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, menyebabkan pemerintah Belanda tidak mampu memperlakukan pribumi yang beragama lain sama dengan jika memperlakukan pribumi yang seagama dengannya.

Pemerintah Belanda melakukan sikap diskriminatif antara memperlakukan agama Islam dengan Kristen dalam segala bidang. Sikap diskriminatif itu ditunjukkan dalam memberikan dana kepada kedua agama tersebut dengan sangat tidak seimbang. Misalnya yang terjadi pada tahun 1917, sumbangan pemerintah Belanda kepada Islam adalah berjumlah f.127.029,; sedangkan sumbangan yang diberikan kepada pihak Kristen pada tahun yang sama yaitu berjumlah f.1.235.500;. Dana yang diberikan kepada Islam tersebut hanyalah sebatas gaji yang diberikan kepada penghulu yang bekerja kepada Belanda. Sedangkan dana yang diberikan kepada agama Kristen, selain untuk gaji pastor dan pendeta, juga diberikan dana untuk membangun gereja, rumah sakit, dan sekolah-sekolah agama Kristen. Islam tidak menerima bantuan dana dari pemerintah Belanda seperti agama Kristen. Pemerintah Belanda melakukan hal tersebut karena faktor kepentingan politik. Pemerintah Belanda melakukan sikap anti-Islam, dan pada

³⁶ Aqib Suminto. *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoort voor Inlandsche Zaken*. Hal. 4.

kenyataannya tidak bersikap netral terhadap agama, seperti yang disebutkan sebelumnya. Hal itu dilakukannya demi tetap mempertahankan kekuasaannya di Indonesia.

Ketidak-realisasinya pernyataan netral terhadap agama ini, juga menunjang terjadinya Kristenisasi di Indonesia. Pada tahun 1909, Idenburg diangkat menjadi Gubernur Jendral di Hindia Belanda. Ia dikenal sebagai orang yang moderat. Namun betapapun moderatnya ia, pernah terungkap pernyataan darinya bahwa Belanda akan tetap menguasai Indonesia sampai agama Kristen menjadi agama bangsa Indonesia. Pada saat itu, masyarakat Islam di Indonesia mengkritik tajam kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah Belanda. Semenjak Idenburg diangkat menjadi Gubernur Jendral Hindia Belanda, dia dianggap melancarkan *kersteningspolitiek*, yaitu kebijaksanaan yang menunjang kristenisasi di Indonesia. Kristenisasi itu makin terasa dilihat dari surat edaran yang diberikan Idenburg kepada masyarakat tentang pasar dan hari Minggu. Dalam surat edaran tersebut ia memerintahkan kepada para pegawai agar menghormati hari Minggu dengan melarang diadakannya pesta dan kegiatan pasar pada hari itu, karena hari Minggu adalah hari suci bagi umat Kristen. Pada saat ia menjabat sebagai Gubernur Jendral, kristenisasi dinilai oleh masyarakat terlalu kuat ditunjang oleh pemerintah Belanda, sehingga berarti Idenburg mengabaikan kebijaksanaan netral terhadap agama yang seharusnya diikutinya.

Kristenisasi yang didukung oleh pemerintah Belanda tersebut, bertujuan untuk menukar agama bangsa Indonesia yang mayoritas Islam, menjadi penganut agama Kristen. Usaha kristenisasi itu mendapat dukungan dari orang-orang Belanda, baik yang berada di Indonesia, maupun orang Belanda yang berada di Negeri Belanda. Mereka berharap dengan dilakukannya kristenisasi, akan menghilangkan pengaruh Islam, sehingga tidak akan ada lagi pihak yang kontra dengan Belanda, bahkan semua pihak akan mendukung pemerintah Belanda dalam usaha menerapkan sistem hukumnya di Indonesia.

Kristenisasi yang dijalankan pihak zending, didukung oleh pemerintah

Belanda dengan memberikan subsidi berupa dana dalam setiap bentuk pembangunan gereja, rumah sakit, dan sekolah-sekolah. Pembangunan-pembangunan tersebut bertujuan untuk menarik umat Islam agar sedikit banyaknya terpengaruh untuk berpindah ke agama Kristen. Dukungan pemerintah Belanda terhadap pihak Kristen tersebut mengakibatkan dakwah Islam menjadi terhambat.

2. Bidang sosial kemasyarakatan

Dalam bidang sosial kemasyarakatan, pemerintah Belanda memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku, dengan cara menggalakkan rakyat agar mendekati Belanda, bahkan Belanda akan membantu rakyat yang akan menempuh jalan tersebut. Pemerintah Belanda mengharapkan terjadinya proses asosiasi antara umat Islam dengan kebudayaan Belanda. Dan setiap usaha asosiasi yang ingin dilakukan oleh masyarakat Islam, akan dibantu oleh pihak Belanda.

Mengenai masalah perkawinan dan waris, yang dalam pandangan Barat termasuk dalam bidang hukum, ditegaskan bahwa hal itu mempunyai hak yang sama untuk dihormati sebagaimana pada bidang pertama, yaitu urusan ibadah. Namun, pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan kebijaksanaan dengan memberikan pengawasan terhadap urusan perkawinan dan perceraian.

Politik Islam Snouck Hurgronje dalam bidang kemasyarakatan ini adalah membuat agar masyarakat Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan kebudayaan Belanda. Menurutnya, untuk menghadapi Islam dalam bidang sosial kemasyarakatan, hendaknya pemerintah Belanda memilih jalan halus, yaitu dengan menyalurkan semangat mereka ke arah yang menjauhi ajaran agamanya dan mendekati budaya Belanda melalui asosiasi kebudayaan.³⁷

Politik asosiasi ini bertujuan untuk mempererat ikatan antara negeri jajahan dengan negara penjajahnya melalui kebudayaan, yaitu bermaksud memperkukuh eksistensi penjajahan Belanda di Indonesia. Masyarakat bangsa

³⁷ *Ibid.* Hal. 24.

Indonesia harus dituntun agar bisa berasosiasi dengan kebudayaan Belanda, dan setiap kecenderungan rakyat untuk berasosiasi harus selalu disambut dan dibantu.

Dalam proses asosiasi ini, pemerintah Belanda bekerjasama dengan para kepala adat dan menggunakan lembaga adat untuk membendung pengaruh Islam yang ada di Indonesia. Kerjasama nyata yang dilakukan pemerintah Belanda terhadap golongan adat terlihat dalam perang-perang yang dihadapi Belanda, misalnya perang Diponegoro, perang Paderi, dan perang Aceh. Belanda membuat supaya orang-orang Islam berperang dalam menghadapi Belanda dan kaum adat sekaligus.

3. Bidang politik.

Sikap pemerintah Belanda dalam menghadapi Islam sebagai kekuatan politik yaitu dengan mencegah setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan-Islamisme. Berdasarkan informasi yang diberitahukan oleh Snouck Hurgronje, pemerintah Belanda akhirnya memahami, bahwa dalam sistem ajaran Islam, tidak terjadi pemisahan antara ibadah agama yang dilakukan secara ritual, dengan politik dalam pengaturan pemerintahan. Untuk itu, Belanda menekan dan menghalangi setiap gerakan politik yang dilakukan masyarakat Islam, karena akan membahayakan kekuasaan pemerintah Belanda di tempat yang penduduknya mayoritas beragama Islam ini.

Pemerintah Belanda melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap pelaksanaan ajaran Islam dalam bidang politik. Tidak akan diterima segala macam usaha yang dilakukan masyarakat Islam dalam melaksanakan kegiatan politik, karena setiap usaha politik yang dilakukan masyarakat Islam akan mengancam eksistensi kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia. Pemerintah Belanda juga mewaspadaikan dan meminimalisir masuknya ide Pan-Islamisme ke Indonesia.

Mengenai bidang politik ini, ditekankan pula oleh pihak pemerintah Belanda agar setiap pegawai pemerintah tidak menggabungkan Pan-Islamisme dengan tugas dan jabatannya. Maksudnya, seorang pegawai pemerintah tidak

dibenarkan mengikuti ide Pan-Islamisme, meskipun ia seorang muslim.

Pemerintah Belanda selalu bersikap waspada terhadap segala kemungkinan yang dapat membahayakan kekuasaannya di Indonesia. Dalam hal ini, para haji sering dicurigai sebagai faktor utama yang membawa pengaruh Pan-Islamisme dari luar, sehingga mereka selalu diawasi dalam kegiatannya. Dalam bentuk sikap waspada terhadap kekuatan politik Islam, maka pemerintah Belanda juga melakukan pengawasan kepada para haji. Semakin meningkatnya pengawasan politik oleh pihak Belanda telah menimbulkan rasa tersingkir dan frustrasi yang mendalam di kalangan kaum elit agama.

Setiap gerakan perlawanan rakyat yang selama ini diterima Belanda yaitu dilakukan oleh masyarakat Islam bangsa Indonesia dalam menjalankan ajaran Islam dalam bidang politik. Umat Islam akan melawan setiap usaha penjajahan yang dilakukan oleh pihak lain yang beragama lain dengan Islam, karena memerangi bangsa kafir yang ingin menghancurkan sistem Islam ialah bagian dari ibadah.

Pada tahun 1882, Lembaga Peradilan Agama diresmikan oleh pemerintah, sehingga dengan demikian politik tidak akan mencampuri masalah agama.³⁸ Seorang penghulu yang mengurus permasalahan Islam, diangkat menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda, dan diberi gaji oleh pemerintah Belanda. Sehingga diharapkan para penghulu itu bersikap pro kepada Belanda, walaupun mereka seorang muslim.

III.2.3 Pemisahan Agama dan Politik dalam Islam

Setelah memahami tentang sistem Islam dan ajaran yang dijalankan oleh masyarakat Islam, Belanda akhirnya memiliki keberanian dalam menghadapi Islam di Indonesia. Atas usul dari Snouck Hurgronje, akhirnya Belanda memutuskan untuk melakukan pemisahan antara agama dan politik dalam Islam. Belanda akhirnya memahami, bahwa dalam melawan Islam, Belanda tidak

³⁸ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, hlm. 29.

mungkin dapat menghancurkan Islam dari luar, seperti yang dilakukan pemerintah Belanda selama ini. Tapi, Islam hanya dapat dihancurkan dari dalam, yaitu dengan membuat supaya umat Islamnya tidak lagi menjalankan ajaran Islam secara keseluruhannya.

Dalam menghadapi Islam, pemerintah Belanda juga mengalami banyak kesulitan. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah Belanda dalam usaha melakukan pemisahan antara agama dan politik dalam Islam.

Beberapa usaha yang dilakukan pemerintah Belanda dalam pelaksanaan pemisahan agama dan politik dalam Islam, yaitu:

1. Pembatasan Haji

Pemerintah Belanda melihat bahwa banyaknya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia, kebanyakan dipimpin oleh para haji. Sepulang dari menunaikan ibadah haji, mereka menjadi semakin fanatik dan pemahaman mereka semakin mendalam tentang Islam. Sikap netral yang semula diberikan kepada pemerintah Belanda kepada Islam dalam menjalankan aktivitas keagamaannya, membawa dampak kemajuan pada sebagian besar umat Islam. Mereka menjadi semakin taat dalam menjalankan perintah agama, seperti melakukan salat, berpuasa, dan melaksanakan ibadah haji. Selain itu, pembangunan sejumlah besar masjid dan musalah juga dipandang sebagai satu pertanda meningkatnya ketaatan beribadah umat Islam.

Setelah dibukanya terusan Suez di Mesir pada tahun 1869, masyarakat Islam Indonesia semakin banyak yang menjalankan ibadah haji ke Makkah. Setiap tahunnya umat Islam yang menjalankan ibadah haji bisa mencapai ribuan orang jumlahnya. Ibadah haji yang dilakukan umat Islam setiap tahunnya itu merupakan bentuk pelaksanaan rukun Islam yang kelima.

Di Makkah, umat Islam bangsa Indonesia bertemu dengan umat Islam dari segala penjuru dunia. Melalui ibadah haji itu, umat Islam

bangsa Indonesia dapat berkomunikasi dengan umat Islam dari wilayah lain. Di sana, mereka akan membicarakan tentang permasalahan Islam yang sedang mereka hadapi, untuk nantinya dimusyawarahkan dalam mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi masing-masing umat. Hal itu yang menyebabkan para haji yang baru pulang dari Makkah dalam melaksanakan ibadah haji, segera melakukan pembaharuan terhadap kondisi Islam di Indonesia, ketika sampai di tanah air. Benih Pan-Islamisme juga terbukti membawa pengaruh kepada para haji yang sudah lama bermukim di Makkah. Sistem komunikasi di dunia Islam telah dibangun dengan sangat baik melalui pelaksanaan ibadah haji. Berarti, berita-berita tentang komunitas Islam di tempat yang jauh sekalipun, akan sampai kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Kontak yang lebih erat antara daerah-daerah yang sangat berjauhan satu sama lain dalam dunia Islam telah dipermudah oleh ibadah haji yang terus meningkat setiap tahunnya, dan dengan adanya komunikasi dan perjalanan yang lebih baik pada saat menunaikan ibadah haji.

Di Indonesia, para haji itu menghadapi pemerintah Belanda yang ingin menguasai wilayah Indonesia, maka mereka menentang hal tersebut dengan melakukan perlawanan. Sebelum kedatangan Belanda, sistem yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum Islam. Berarti, jika Belanda ingin menerapkan sistem hukumnya di Indonesia, Belanda harus terlebih dahulu menghancurkan sistem Islam, dan merubahnya dengan sistem Belanda.

Terjadinya semangat keagamaan yang besar dalam kalangan umat Islam Indonesia, menjadikan semakin bertambahnya jumlah orang yang menunaikan ibadah haji. Meningkatnya ibadah haji ini sangat penting artinya bagi Belanda, bukan hanya bagi penyebaran pembaharuan-pembaharuan di seluruh dunia Islam, melainkan juga bagi pertumbuhan suatu golongan elit agama. Oleh sebab itu, maka Makkah dapat dipandang

sebagai jantung kehidupan agama Islam.

Ketakutan Belanda terhadap ide Pan-Islamisme yang dibawa oleh para haji ke Indonesia, dibuktikan dengan semakin berkembangnya kehidupan beragama. Karakteristik kehidupan masyarakat ialah dengan bersikap anti-Barat. Penaklukan-penaklukan yang dilakukan imperialisme Barat terhadap wilayah umat Islam, membuat para pemikir agama menjadi sadar, bahwa dunia Islam sebenarnya sedang terancam bahaya yang lama kelamaan akan jatuh ke bawah dominasi Barat. Menghadapi ancaman dari Barat ini, umat Islam menampakkan sikap fanatisme yang militan dan perasaan benci terhadap penakluk-penakluk yang kafir itu.

Umat Islam melihat adanya pemerintah Belanda di Indonesia akan mengganggu tatanan sistem Islam. Maka dengan dipimpin oleh para haji yang masih memiliki semangat ke-Islaman yang besar, dilakukanlah perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia. Rakyat sangat menghormati para haji, sehingga para haji itu dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mendorong rakyat agar lebih mentaati kewajiban-kewajiban agama mereka. Para haji itu juga dapat menggerakkan rakyat dalam jumlah besar untuk sama-sama melawan pemerintahan Belanda.

Menurut anggapan di kalangan masyarakat Eropa, Makkah hanya merupakan tempat persemaian fanatisme keagamaan, dimana kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji ditanamkan perasaan permusuhan terhadap penguasa-penguasa Kristen di tanah air mereka.³⁹ Berbagai macam langkah yang telah diambil untuk menempatkan seluruh penyelenggaraan perjalanan naik haji di bawah pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda tidak hanya berusaha keras untuk mengurangi resiko dan bahaya yang dihadapi dari orang-orang yang naik haji, tetapi juga berusaha mengawasi segala kegiatan dan gerak-gerik mereka di desa-desa tempat asal mereka setelah pulang dari haji. Para haji

³⁹ Sartono Kartodirdjo. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Hal. 216.

yang dinilai berbahaya ialah mereka yang sudah lama tinggal di Makkah (*muqim*) dalam waktu yang cukup lama. Mereka mempunyai cukup waktu dan kesempatan untuk bertukar pikiran dengan sesama muslim di daerah lain di dunia Islam. Perjalanan naik haji itu telah melahirkan satu benteng solidaritas yang ampuh di dunia Islam, dan bahwa orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji itu pulang ke negeri mereka dengan membawa semangat kebesaran dan keagungan Islam. Dari sudut pandang kolonial, terjadi perubahan yang radikal dalam pandangan para haji itu mengenai bangsa-bangsa Barat. Di satu pihak, mereka membenci dan memandang rendah kaum kafir, dan di lain pihak, mereka merasa yakin akan pengaruh Islam yang tiada bandingannya. Selama ada orang-orang yang naik haji, maka selama itu pula berlangsung terus hubungan-hubungan religio-politik yang esensial antara Makkah, dengan masyarakat-masyarakat Islam yang berada di segala penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Selama bermukim di Makkah, orang-orang Indonesia terus berhubungan, tidak hanya dengan anggota-anggota kerabat dan orang-orang Islam yang berasal dari tanah air mereka saja, melainkan juga dengan umat Islam dari negara lain yang sama-sama sedang menunaikan ibadah haji. Dengan cara inilah diciptakan perasaan yang sama untuk menyebarkan perasaan permusuhan terhadap segala bentuk penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah Barat terhadap kekuasaan Islam. Pemerintah Belanda juga merasa khawatir dengan adanya sejumlah haji yang "terinfeksi" dengan pemahaman Pan-Islamisme.

Setelah pulang ke tanah air, para haji itu tampil sebagai orang-orang yang gigih mendukung gerakan ke arah generasi agama, yang bertujuan memperkuat sendi-sendi keagamaan. Mereka menentang sikap yang melalaikan ajaran agama dan berusaha memulihkan cita-cita Islam yang murni. Tidak mengherankan jika kampanye-kampanye yang gigih ini sering kali diikuti oleh pemberontakan-pemberontakan yang sesungguhnya

terhadap penguasa-penguasa yang tidak seagama dengannya.

Melihat hal itu, pemerintah Belanda berusaha mencegah terjadinya pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia. Namun, pemerintah Belanda tidak akan dapat menghentikan kebiasaan naik haji yang dilakukan setiap tahun oleh umat Islam. Walaupun sudah diberlakukan biaya yang besar bagi umat Islam yang hendak menunaikan ibadah haji, namun tidak menggoyahkan semangat mereka dalam menunaikan ibadah haji. Segala peringatan yang dikeluarkan pemerintah Belanda sehubungan dengan pelarangan ibadah haji, justru menimbulkan hasrat yang lebih besar bagi umat Islam untuk tetap menjalankan ibadah haji. Orang-orang Belanda di Indonesia juga mendukung terhadap pelarangan ibadah haji. Ada juga yang mengusulkan untuk menembak mati para haji yang baru pulang dari menjalankan ibadah haji.⁴⁰

Pada tahun 1859, pemerintah Belanda mengeluarkan suatu ordonansi yang mengatur masalah ibadah haji, yaitu agar pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji lebih diperketat lagi. Belanda mengeluarkan kebijaksanaan tersebut berhubungan dengan banyak terjadinya perlawanan rakyat kepada pihak Belanda yang dipimpin oleh para haji, seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan, yaitu terjadinya Perang Banjar, perlawanan rakyat di Garut dan Cilegon.

Setiap tahun, ribuan umat Islam Indonesia melaksanakan ibadah haji ke Makkah, sebagai bentuk pelaksanaan rukun Islam yang kelima. Para mukmin Indonesia tersebut, banyak yang membawa ajaran ortodoks setelah pulang dari menunaikan ibadah haji. Pemerintah Belanda juga melihat bahwa banyaknya perlawanan rakyat yang ditujukan kepada pemerintah Belanda memang banyak yang dimotori dan dipimpin oleh para haji. Dari kalangan orang-orang Belanda banyak yang menginginkan dilarangnya pelaksanaan ibadah haji, karena ibadah haji dinilai

⁴⁰ Aqib Suminto. *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoort voor Inlandsche Zaken*.

menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi fanatik. Banyak pendapat dari kalangan orang Belanda yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda harus segera mengambil tindakan terhadap umat yang menjalankan ibadah haji tersebut. Para haji secara politis dinilai berbahaya. Pada tahun 1908, salah seorang missionaris Belanda, yang bernama Bogardt, menyatakan bahwa melarang pelaksanaan ibadah haji akan lebih baik daripada kemudian terpaksa harus menembak mati mereka.

Di atas telah dijelaskan bahwa pemerintah Belanda memberikan kebebasan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Di samping itu, pemerintah Belanda juga melakukan pengawasan yang ketat pada pelaksanaan ajaran agama Islam tersebut. Menunaikan ibadah haji merupakan bentuk ibadah yang dilakukan umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Harusnya, pemerintah Belanda bersikap netral dan membebaskan seluruh umat Islam dalam menjalankan ibadah haji tersebut. Maka, peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah Belanda dalam usaha membatasi, bahkan melarang umat Islam dalam menjalankan ibadah haji mendatangkan kritik, baik dari kalangan Islam maupun dari pihak orang-orang Belanda.

2. Bidang Pendidikan

Pemerintah Belanda melakukan pemisahan dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu dengan dibangunnya pendidikan Belanda yang berlatar belakang pemahaman Barat. Sekolah yang dibangun oleh pemerintah Belanda tersebut juga diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat yang berasal dari kalangan bangsawan Indonesia. Dalam pendidikan Barat tersebut, murid-murid dididik agar bersikap netral terhadap agama, bahkan sampai membuat murid-murid menjadi tidak peduli dengan agama. Hal itu dikarenakan dalam sekolah Belanda tidak diajarkan pendidikan agama Islam. Sistem

pendidikannya sekuler, dengan tidak memasukkan pendidikan agama Islam di dalam kurikulum. Pendirian sekolah Belanda tersebut melahirkan golongan yang disebut kaum intelek, dan bersikap kebarat-baratan, sehingga lupa terhadap ajaran agama Islam.

Dalam usaha asosiasi kebudayaan, pemerintah Belanda memanfaatkan faktor pendidikan, yaitu dengan membuka sekolah-sekolah Belanda dengan dilatar belakangi budaya Barat bagi masyarakat Indonesia. Menurut Snouck, dengan memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia, maka diharapkan tingkat loyalitas rakyat terhadap Belanda akan semakin meningkat, sehingga akan menghilangkan usaha-usaha pemberontakan rakyat terhadap Belanda. Belanda juga merasa berkewajiban moral untuk mendidik para bangsawan Indonesia dan menjadikannya *partner* dalam kehidupan budaya dan sosial. Partner tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan jurang pemisah antara pemerintah Belanda dengan rakyat Indonesia. Belanda mencita-citakan kemajuan Indonesia ala Barat yang tingkat penyesuaiannya akan ditentukan oleh pemerintah Belanda.

Sistem pola pendidikan yang ditawarkan Snouck ialah mengubah bangsawan tradisional Indonesia menjadi elit berpendidikan Barat. Belanda membangun sekolah HIS (*Hollands Inlands School*) yang hanya diperuntukan bagi keluarga bangsawan Indonesia. Kebijakan yang diberikan pemerintah Belanda dalam bidang pendidikan, tidak terlepas dari pola politik kolonialnya. Alasan penyelenggaraan pendidikan lebih ditekankan pada kepentingan pemerintah kolonial terhadap kepentingan rakyat jajahannya. Untuk itu, pemerintah Belanda tidak mendirikan sekolah yang diperuntukan bagi rakyat biasa, karena untuk menghindari rusaknya sistem pemerintahan kolonial yang berlaku di Indonesia. Pendidikan Barat yang diberikan Belanda itu diformulasikan sebagai

faktor yang akan menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia.⁴¹

Masyarakat Islam Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi segala macam usaha Belanda dalam menguasai Indonesia. Kesadaran bahwa pemerintah Belanda merupakan pemerintahan kafir yang menjajah bangsa dan agama mereka, semakin mendalam tertanam di benak rakyat, terutama golongan santri. Pesantren, yang merupakan pusat pendidikan Islam, pada waktu itu mengambil sikap anti-Belanda.

Usaha yang dilakukan Belanda dalam menangani masalah pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat Islam ialah dengan mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru yang sangat menekan bangsa Indonesia, terutama masyarakat Islamnya. Salah satu kebijaksanaan pemerintah kolonial yang oleh umat Islam dirasakan sangat menekan adalah ordonansi guru.

Ordonansi pertama dikeluarkan pada tahun 1905 oleh pemerintah Belanda, yaitu mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu kepada pemerintah kolonial sebelum memberikan pengajaran dan melaksanakan tugasnya sebagai guru agama. Ordonansi kedua dikeluarkan pada tahun 1925, yaitu hanya mewajibkan guru agama untuk melaporkan diri. Kedua ordonansi ini dimaksudkan sebagai media pengontrol dalam mengawasi aktivitas para pengajar agama Islam, sehingga akan mencegah terjadinya pengajaran-pengajaran yang akan membahayakan kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia.

Setelah terjadinya peristiwa Cilegon pada tahun 1888, maka pada tahun 1890 dilakukan pengawasan terhadap pendidikan Islam, karena Belanda melihat bahwa perlawanan yang dilakukan masyarakat Cilegon tersebut dimotori oleh para haji dan para guru agama. Akhirnya di Jawa dilakukan perburuan terhadap guru agama. Dalam pengawasan terhadap guru agama tersebut, diperintahkan kepada para bupati untuk melaporkan

⁴¹ *Ibid.* Hal. 49.

setiap tahun daftar guru agama di tiap-tiap daerahnya. Kemudian pada tahun 1904, Snouck Hurgronje memberikan saran agar pengawasan tersebut meliputi adanya surat izin khusus dari bupati kepada para guru agama, daftar tentang guru dan murid, serta pengawasan yang dilakukan oleh para bupati tersebut harus dilakukan oleh suatu panitia. Maka pada tahun 1905 dikeluarkan sebuah peraturan tentang pendidikan agama Islam yang disebut dengan Ordonansi Guru. Ordonansi guru tersebut berdasarkan Staatsblad 1905 no.550, yang isinya adalah sebagai berikut⁴²:

- Seorang guru agama Islam harus dibenarkan mengajar bila sudah memperoleh izin dari Bupati.
- Izin tersebut baru diberikan bila guru agama tersebut jelas-jelas bisa dinilai sebagai orang baik, dan pelajaran yang diberikannya tidak bertentangan dengan keamanan ketertiban umum.
- Guru agama Islam tersebut harus mengisi daftar murid, disamping harus menjelaskan mata pelajaran yang diajarkan.
- Bupati atau instansi yang berwenang boleh memeriksa daftar itu sewaktu-waktu.
- Guru agama Islam bisa dihukum kurung maksimum delapan hari atau denda maksimum dua puluh lima rupiah, bila mengajar tanpa izin atau lalai mengisi/mengirimkan daftar tersebut; atau enggan memperlihatkan daftar itu kepada yang berwenang, berkeberatan memberi keterangan, atau enggan diperiksa oleh yang berwenang.
- Izin itu pun bisa dicabut bila ternyata berkali-kali guru agama tersebut melanggar peraturan, atau dinilai berkelakuan kurang baik.

Dalam pelaksanaannya, ordonansi guru ini bisa dipergunakan untuk menekan agama Islam. Padahal tujuan awal dibuatnya ordonansi guru ini adalah untuk mengawasi pendidikan Islam, bukan untuk

⁴² *Perkara Agama Islam Bumiputera*, (Batavia: Departemen Pemerintahan Dalam Negeri, 1920), hlm. 1-25. Lihat, Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche Zaken*. Hal. 52-53.

menghambat atau menekannya.

Pengawasan terhadap pendidikan Islam yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, selain diberikan kepada para guru yang mengajar, juga diterapkan kepada lembaga pendidikan Islam. Pada tahun 1923, pemerintah Belanda membuat suatu kebijaksanaan baru, yaitu bagi setiap orang yang hendak mendirikan suatu lembaga pendidikan, harus memberitahukan terlebih dahulu cara pengajaran dan tempat mengajarnya secara tertulis kepada kepala daerah setempat.

Kebijaksanaan ini dikeluarkan oleh pemerintah Belanda sebagai akibat dari semakin banyaknya didirikan sekolah swasta masyarakat Indonesia, yang dikenal sebagai "sekolah liar". Belanda melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah yang dibangun oleh masyarakat Indonesia tersebut, untuk mencegah terjadinya pengajaran yang dapat membahayakan kekuasaan pemerintah Belanda, yaitu mengontrol dan mengendalikan perkembangan rasa nasionalisme rakyat Indonesia. Namun, usaha pemerintah Belanda untuk menekan sistem pendidikan Indonesia ternyata mendapat perlawanan keras dari masyarakat Indonesia, baik dari masyarakat Islamnya ataupun dari organisasi nasional.

Selain pendidikan Barat yang ditawarkan Belanda, di Indonesia sudah terdapat pendidikan yang bercorak Islam, yaitu pendidikan pesantren. Di dalam pesantren, para santri diajarkan untuk memahami ajaran agama Islam secara mendalam. Sehingga menghasilkan orang-orang yang taat menjalankan perintah agama.

Perlawanan terhadap pemerintah Belanda juga banyak yang dijalankan oleh para santri. Dalam menangani masalah pendidikan ini, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijaksanaan dalam rangka menekan sistem pendidikan Islam. Pada tahun 1923, pemerintah Belanda mengeluarkan Ordonansi Pengawasan terhadap pendidikan di Indonesia, yaitu setiap orang yang hendak mendirikan suatu lembaga pendidikan,

harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada kepala daerah setempat, dengan menyebutkan cara pengajaran dan tempat mengajarnya.⁴³

3. Pemanfaatan Adat

Perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia kepada pemerintah Belanda, kebanyakan juga merupakan perlawanan antara golongan ulama dengan kaum adat. Awalnya, hubungan antara golongan ulama dengan golongan adat dapat berjalan dengan baik dan mereka dapat hidup secara berdampingan dengan damai. Para ulama tidak akan mengusik kehidupan kaum adat dan tidak akan mengganggu kekuasaan para kepala adat, selama mereka tidak keluar dari jalur agama Islam. Para ulama akan menegur kaum adat apabila mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama.

Belanda melihat adanya peluang pada kaum adat dalam membantu usaha Belanda melawan golongan ulama yang sangat sulit ditaklukan. Belanda akan menjadikan kaum adat sebagai alat dalam melawan golongan ulama. Kenyataan itu terjadi pada beberapa peristiwa perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam dalam melawan kaum adat, yang dipengaruhi oleh Belanda.

Contohnya dalam Perang Diponegoro. Belanda selalu ikut campur dalam segala urusan pemerintahan Keraton, dengan maksud mencari massa dari kalangan bangsawan. Akhirnya Belanda berhasil memecah belah keadaan pemerintahan di dalam Keraton. Dengan begitu, penaklukan kepada golongan ulama yang melawan Belanda, akan dapat ditekan.

Keadaan yang sama terjadi pada saat perang Paderi. Awalnya, Belanda membuat keadaan sehingga kaum adat marah terhadap pihak golongan ulama, karena dianggapnya selalu ikut campur terhadap urusan-

⁴³ Aqib Suminto. *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoort voor Inlandsche Zaken*. Hal. 58.

urusan adat. Atas pengaruh Belanda, para kepala adat juga menjadi khawatir, kekuasaannya di daerah tersebut akan diambil alih oleh para ulama. Karena mereka juga melihat, pengaruh kaum ulama semakin besar dalam masyarakat di daerahnya.

Pada tahun 1937, pemerintah Belanda mulai membatasi wewenang dan kekuasaan pengadilan agama. Perselisihan dalam persoalan waris dan waqaf diadili oleh pengadilan negeri berdasarkan pada hukum adat, dan bukan berdasarkan hukum Islam. Posisi pengadilan agama menjadi terletak dibawah pengadilan negeri, yang tidak berdasar pada hukum Islam. Kebijakan Belanda tersebut bertujuan untuk mengurangi peranan hukum Islam dalam masyarakat Indonesia.

4. Memisahkan struktur masyarakat Islam

Pemerintah Belanda melakukan pemecahan pada golongan-golongan sosial masyarakat Islam. Semakin meningkatnya pengawasan politik oleh pihak Belanda telah menimbulkan perasaan tersingkir dan frustrasi yang mendalam di kalangan kaum elit agama.

Adanya kekuasaan Belanda secara berdampingan ini telah menimbulkan suatu situasi politik yang semakin tidak stabil. Pada dasarnya, dalam Islam juga dijalankan kegiatan politik, dan memiliki struktur kepemimpinan Islam. Pemimpin tertinggi dalam pelaksanaan politik Islam berada pada seorang Sunan, berasal dari kata Susuhunan (Suhu, dalam bahasa Cina artinya Guru). Seorang Sunan, biasa kita kenal dengan sebutan ulama, ialah seorang yang menguasai isi dan ajaran Islam yang terdapat di dalam al-Quran. Ia yang memberikan nasihat kepada Sultan (Raja) dalam menjalankan politik pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan Islam, keseluruhan aspek kehidupan masyarakat harus dijalankan berdasarkan pada perintah Allah swt yang terdapat dalam al-Quran.

Struktur kedua dalam sistem pemerintahan Islam ialah seorang Sultan. Secara struktur Islam, kedudukan Sultan berada di bawah Sunan. Namun, pelaksana pemerintahannya berada pada Sultan. Dalam segala aspek pemerintahan, Sultan yang memiliki hak dalam pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan pada nasihat dari Sunan. Apabila seorang Sultan melakukan penyelewengan terhadap ajaran al-Quran, maka Sunan harus membenarkan tindakan Sultan dan mengembalikannya lagi kepada ajaran yang benar.

Sultan memerintah rakyat dalam sistem kemasyarakatan Islam. Seluruh masyarakat Islam, yang berada dalam sistem Islam tersebut wajib mematuhi segala perintah dari Sultannya, karena perintah yang diberikan oleh Sultan, merupakan perintah Allah. Berarti jika terdapat umat Islam yang tidak taat terhadap perintah Sultan, berarti dia tidak taat terhadap perintah Allah, dan harus diberikan hukuman berdasarkan aturan Islam pula yang terdapat di dalam al-Quran. Seorang Sultan juga wajib memberikan perlindungan dan pengaturan yang baik kepada seluruh rakyatnya. Sultan juga berkewajiban menyejahterakan seluruh masyarakatnya.

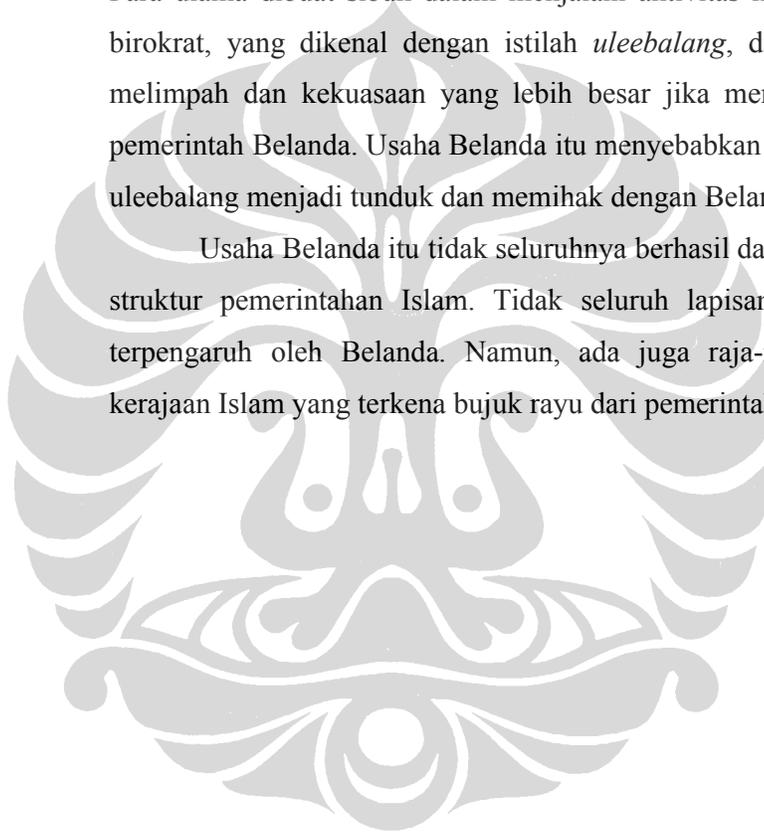
Sistem pemerintahan Islam seperti tersebut diatas yang dikacaukan oleh Belanda. Seorang Sunan yang faham terhadap ajaran al-Quran dibuat supaya lupa akan mengurus urusan politik. Belanda membuat sibuk para Sunan agar hanya menjalankan ajaran ibadah ritual saja demi bekal di akhirat nanti, tanpa memikirkan urusan duniawi.

Para Sultan dipengaruhi untuk hanya memikirkan kepentingannya sendiri saja di dunia, dan menjalankan sistem pemerintahan dengan terlepas dari ajaran Islam. Sultan diberikan janji akan mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dan harta yang lebih banyak. Usaha Belanda ialah membuat umat-umat Islam tidak lagi menjalankan perintah agamanya dengan baik, dan melupakan perintah Allah di dalam al-Quran.

Sehingga dalam menjalankan perintah Allah tersebut, mereka menjalankannya dengan tidak utuh dan tidak secara keseluruhan. Pada saat seperti itu, masyarakat akan menjadi tidak terurus lagi dan sistem pemerintahan Islam akan menjadi kacau.

Dalam kejadian perang Aceh, Belanda melakukan usaha memisahkan struktur masyarakat Islam di Aceh dalam menghadapi Islam. Para ulama dibuat sibuk dalam menjalani aktivitas keagamaan. Para elit birokrat, yang dikenal dengan istilah *uleebalang*, diberikan harta yang melimpah dan kekuasaan yang lebih besar jika mereka tunduk kepada pemerintah Belanda. Usaha Belanda itu menyebabkan beberapa ulama dan *uleebalang* menjadi tunduk dan memihak dengan Belanda.

Usaha Belanda itu tidak seluruhnya berhasil dalam menghancurkan struktur pemerintahan Islam. Tidak seluruh lapisan masyarakat Islam terpengaruh oleh Belanda. Namun, ada juga raja-raja pada beberapa kerajaan Islam yang terkena bujuk rayu dari pemerintah Belanda.



BAB IV

Kesimpulan

Sebagian besar penduduk di Indonesia ialah beragama Islam. Pemerintah Hindia Belanda berusaha keras menemukan politik Islam yang tepat untuk tetap berkuasa di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda dan umat Islam Indonesia, masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Di satu pihak, pemerintah Belanda dengan segala daya upaya berusaha memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya di Indonesia, sementara di pihak lain, umat Islam bangsa Indonesia juga berusaha untuk melepaskan diri dari penguasa yang tidak seagama dengan dirinya. Dalam usaha menguasai Indonesia, Belanda menemukan perlawanan dari pihak raja-raja Islam dan seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam, sehingga Islam dipandang sebagai ancaman pemerintah Hindia Belanda.

Belanda berusaha untuk menjadikan masyarakat Islamnya tidak menjadi fanatik dalam menjalankan ajaran agamanya, sehingga mereka tidak lagi mengurus masalah pemerintahan. Untuk itu dilakukanlah pemisahan antara agama dan politik dalam Islam. Tujuan dilakukannya pemisahan antara agama dan politik dalam Islam di Indonesia ialah untuk mengurangi perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia kepada Belanda. Umat Islam dibentuk supaya tidak lagi mengurus masalah pemerintahan, sehingga usaha Belanda dalam menguasai Indonesia dan menerapkan sistem hukumnya di Indonesia dapat tercapai dengan mudah tanpa adanya perlawanan dari masyarakat Islam.

Selain untuk meredam perlawanan rakyat, ternyata Belanda memiliki tujuan lain dengan dilakukannya pemisahan antara agama dan politik dalam Islam. Belanda berusaha menerapkan sistem hukumnya di Indonesia, sehingga aturan yang dipakai dalam sistem pemerintahan di Indonesia tidak lagi menggunakan

sistem Islam, namun menggunakan sistem Belanda yang berdasarkan faham Barat.

Kebijaksanaan pemerintah Belanda dalam menangani masalah Islam di Indonesia, dikenal dengan istilah *Islam Politiek*⁴⁴, dimana Snouck Hurgronje dipandang sebagai peletak dasarnya. Sebelum itu, kebijaksanaan pemerintah Belanda terhadap Islam hanya berdasarkan rasa takut dan tidak mau ikut campur, karena Belanda belum banyak menguasai masalah Islam. Dalam menangani permasalahan Islam di Indonesia, pemerintah Belanda berusaha untuk memahami tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan Islam. Usaha yang dilakukan Belanda dalam menghadapi Islam di Indonesia ialah dengan dilakukannya pemisahan antara agama dan politik dalam Islam.

Kedatangan Snouck Hurgronje pada akhir abad ke-19 telah memberikan jalan keluar bagi permasalahan Islam yang sedang dihadapi pemerintah Hindia Belanda. Berdasarkan analisa Snouck Hurgronje tentang Islam, maka harus dipisahkan antara agama dan politik dalam Islam. Karena Islam tidak dapat dihancurkan dari luar dalam bentuk serangan terhadap masyarakat Islam, namun Islam akan mudah ditaklukkan apabila dihancurkan dari dalam diri Islam sendiri. Maka pemerintah Hindia Belanda membuat agar masyarakat Islamnya hanya fokus menjalankan aktivitas keagamaannya saja tanpa mengurus aktivitas politik.

Dengan dilakukannya pemisahan agama dan politik dalam Islam itu Belanda juga mengambil keuntungan yang lain. Dengan tidak mengurus masalah politik dan aktivitas kehidupan lainnya tidak dijalankan berdasarkan aturan Islam, maka akan terjadi asosiasi kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Belanda, sehingga diharapkan nantinya masyarakat Indonesia akan berterimakasih kepada Belanda dengan membawakannya kebudayaan yang baru. Gaya hidup dan pola pikir masyarakat Islam nantinya akan lebih mencirikan kebudayaan yang bukan Islam.

⁴⁴ Aqib Suminto. *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoort voor Inlandsche Zaken*.

DAFTAR REFERENSI

- Alfian, Ibrahim. *Sastra Perang, Sebuah Pembicaraan Mengenai Hikayat Perang Sabil*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Departemen P dan K. *Perang Kolonial Belanda di Aceh, The Dutch Colonial War in Aceh*. Banda Aceh, 1977.
- Gobee, E. dan Adriaanse, C., ed. *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889—1936, vol I-XII*. Jakarta: INIS, 1990.
- Hurgronje, Snouck. *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje Jilid I-XII*. Jakarta: INIS, 1993.
- _____. *Aceh di Mata Kolinialis, Jilid I*. Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.
- _____. *Islam di Hindia Belanda*. Jakarta: Djambatan, 1974.
- Ja'kub, Ismail. *Sedjarah Islam di Indonesia*. Jakarta: Widjaja, 1972.
- Kaptein, Nico, dan Meij, Dick van der. *Delapan Tokoh Ilmuan Belanda Bagi Pengkajian Islam Indonesia*. Jakarta: INIS, 1995.
- Kartodirdjo, Sartono. *Sejarah Perlawanan-Perlawanan Terhadap Kolonialisme*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1973.
- _____. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Sejarah Pergerakan Nasional Jilid II: Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- _____. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- _____, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid III*. Jakarta: Depdikbud, 1975.
- _____, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid IV*. Jakarta: Depdikbud, 1975.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.
- Noer, Deliar. *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1983.

- Pijper, G. F. *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900—1950*. Jakarta: UI-Press, 1985.
- Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche Zaken*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Veer, Paul van 'T. *Perang Aceh, Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje*. Jakarta: Grafitipers, 1985.
- Zuhairi, dkk. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

